

## BAB 4

### LEKRA DALAM POLITIK INDONESIA 1950 - 1966

#### 4.1. Lahirnya Lekra

D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto membentuk Lekra pada 17 Agustus 1950, tepat lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau yang biasa mereka sebut revolusi Agustus 1945. Empat orang pendiri Lekra ini memperbolehkan semua seniman, sastrawan dan pekerja-pekerja kebudayaan, seperti buruh dan tani yang biasa melakukan kegiatan kebudayaan, untuk bergabung dengan lembaga ini.

Pemikiran dasar Lekra adalah memerdekakan rakyat, artinya, seluruh rakyat haruslah terpenuhi seluruh haknya, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berekspresi, dan hak atas kehidupan yang layak. Lekra memiliki kekhawatiran tentang merosotnya garis revolusi. Menurut Lekra, revolusi haruslah memperjuangkan kemerdekaan rakyat. Jika garis revolusi melenceng, tentulah rakyat akan menderita. Untuk menjaga garis revolusi berjalan di jalur yang benar, pekerja-pekerja kebudayaan, bersama dengan para politisi, harus memikul tanggung jawab ini bersama.

Lekra lahir di masa seni hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Para pendiri Lekra mencoba mendobrak hegemoni ini. Mereka ingin rakyat biasa juga bisa mengerti dan menikmati seni. Karena itulah, di masa awal pembentukannya, Lekra membuat karya seni, semisal puisi dan lukisan yang berhubungan langsung dan dimengerti oleh rakyat.

Mukadimah dan Peraturan Dasar I yang disahkan pada tahun 1950 menyebutkan:

*“Tugas daripada Rakyat Indonesia untuk membuka segala kemungkinan supaya bisa mengetjap kesenian, ilmu dan industri tidak dimonopoli oleh golongan ketjil lapisan atas dan dipergunakan untuk kepentingan dan kenikmatan golongan ketjil itu. Rakyat Indonesia harus berdjjuang untuk menguasai dan memiliki kesenian, ilmu dan industri.”*

Sikap ini kemudian dipertegas lagi pada revisi Mukadimah pada tahun 1959 mengenai tugas dan kedudukan rakyat. Yang berbunyi:

*“Bahwa Rakjat adalah satu2nja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh Rakjat...Lekra berpendapat bahwa setjara tegas berpihak pada Rakjat, adalah satu2nja djalan bagi seniman2, sardjana2 maupun pekerdja kebudajaan lainnja, untuk mentjapai hasil2 jang tahan udji dan tahan waktu.”*

#### **4.2. Visi dan Misi Lekra**

Lekra menyelenggarakan kongres pertamanya pada 27 Januari 1959, yang dinamakan Kongres Nasional I Lekra, yang dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. Di tengah berlangsungnya kongres, Lekra menebar pamflet resmi bergambar seekor merpati putih yang sedang terbang. Di paruhnya, sang burung putih terlihat menjepit sekuntum bunga yang juga berwarna putih. Di bagian kaki sang burung, tertera sebuah kalimat yang berbunyi: “Seni kita untuk...” Di bawah kalimat ini terlihat gambar beberapa adegan tari tradisional. Dalam logonya ini, Lekra memproklamirkan diri bahwa mereka adalah sebuah lembaga pembawa misi perdamaian. Dan bagi Lekra, perdamaian sejati hanya bisa diperoleh bila sebuah negeri berdaulat penuh atas tanah dan bangsanya.

Saat awal terbentuk, Lekra tidak memiliki pemimpin yang hierarkis. Lekra hanya terdiri dari beberapa lembaga yang berkaitan dengan seni dan budaya, seperti lembaga sastra, seni lukis, musik, tari, drama, film dan ilmu. Lembaga-lembaga ini dibentuk di beberapa daerah –selain Jakarta, dengan tujuan melaksanakan kegiatan seni dan budaya tersebut.

Saat Kongres Nasional pertama ini, Lekra kemudian membentuk struktur organisasi yang lebih kokoh. Jika sebelumnya lembaga-lembaga seni dan budaya tersebut berada di bawah Lekra Daerah, Lekra Cabang, dan Lekra ranting, maka dalam struktur baru ini, seluruh lembaga dialihkan menjadi tanggung jawab Lekra pusat, yang berada di Jakarta.

Pada Kongres ini, Lekra juga mengubah Mukadimah mereka. Jika pada Mukadimah tahun 1950, Lekra menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kebudayaan, maka pada Mukadimah 1959, Lekra menyatakan bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Dalam Mukadimah ini, Lekra juga mengubah strata sosial versi mereka. Jika sebelumnya, di masa awal pembentukan Lekra pada tahun 1950, Lekra membedakan kelas sosial antara rakyat jelata

dengan kaum ningrat atau kaum kelas atas, maka, pada tahun 1959, Lekra membedakan strata sosial menjadi Bangsa Indonesia dengan kaum imperialis dan feodalis.<sup>18</sup>

Mukadimah ini juga mencantumkan aturan dasar Lekra sebagai salah satu lembaga kebudayaan. Aturan ini menunjukkan langkah-langkah serta visi berkesenian dan berkebudayaan Lekra, yakni “seni untuk rakyat,” artinya, seni bukan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang, tapi juga dapat dinikmati oleh setiap orang dalam masyarakat.

Saat berpidato pada kongres di Solo ini, Njoto, salah seorang pendiri Lekra mengatakan, politik tanpa kebudayaan masih bisa jalan, tapi kebudayaan tanpa politik tidak bisa berjalan sama sekali. Saat itulah Njoto kemudian menggaungkan sebuah jargon, yang kemudian terkenal sebagai jargon milik Lekra: Politik sebagai panglima. Ini berarti setiap karya seni seharusnya menyampaikan aspirasi rakyat, sebab, kehidupan rakyat, termasuk seni, tidak lepas dari kehidupan berpolitik.

Selain jargon terkenal ini, Lekra juga memiliki beberapa azas. Salah satunya adalah azas 1-5-1, yang berarti (1) meluas dan meninggi; (2) tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik; (3) tradisi baik dan kekinian revolusioner; (4) kreativitas individual dan kearifan massa; dan (5) realisme sosial dan romantik revolusioner. Kelima hal ini memerlukan metode turun ke bawah atau yang disebut turba, artinya, mendapatkan pemahaman yang tepat dari kehidupan langsung rakyat, bukan hanya berdasarkan khayalan-khayalan. Turba kemudian dijabarkan lagi menjadi tiga sama, yang berarti bekerja bersama, makan bersama, dan tidur bersama. Singkatnya, Lekra berupaya menjaga solidaritas dan kolektivitas antara pekerja kebudayaan dan rakyat.

Poin pertama dari azas 1-5-1 yang berbunyi meluas dan meninggi, berasal dari pemikiran Pelukis Joebaar Ajoeb. Menurut Joebaar, meluas dalam arti popularisasi, yang berwujud perekrutan anggota baru, ekspresi seni yang lebih populer, dan partisipasi massa yang lebih besar. Sedangkan meninggi berarti meningkatkan mutu artistik dan mutu ideologis.<sup>19</sup> Njoto kemudian menambahkan

---

<sup>18</sup> Rhoma, *op.cit*, hal. 42

<sup>19</sup> Antariksa, *Tuan tanah Kawin Muda* (Yogyakarta, 2005), hal. 51

gagasan turun ke bawah atau turba yang menuntut para senimannya untuk bergerak ke bawah, bekerja dan mencipta bersama rakyat.

Gagasan turba dari Njoto ini kemudian menimbulkan multitafsir di kalangan seniman Lekra sendiri. Pelukis Basuki Resobowo menafsirkan gagasan turba dengan caranya sendiri. Dalam keseharian hidupnya, Basuki, yang hidup malang-melintang di Eropa selama beberapa waktu, menerapkan cara hidup yang ia sebut *la vie est la misere*: Hidup adalah sengsara. Basuki menganggap, kursi rotan yang tidak reot dan kasur yang empuk, sebagai penghalang kerja penciptaan. Karena itu ia rela tinggal di apartemen yang kecil dan sederhana (padahal ia mampu untuk tinggal di apartemen yang lebih baik), demi penciptaan karya seninya dan demi azas ini.<sup>20</sup>

Seniman Lekra Yogyakarta menafsirkan turba dengan cara menyamakan dengan moto mereka: *beleven* dan *meeleven*, yang berarti mengalami atau menghayati dan ikut serta merasakan apa yang dialami, dihayati dan dirasakan sesama. Karena itu, menurut Hersri Setiawan (penulis yang telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya buku *Memoar Pulau Buru* pada tahun 2004), metode turba tidak menjadi masalah bagi para seniman, melainkan penamaan baru dari metode kerja penciptaan: metode riset.

Penyair Kusni Sulang menafsirkan turba sebagai ajakan bagi seniman untuk bekerja secara terencana dan sebagai urusan bersama.<sup>21</sup> Menurut Kusni, seniman yang rajin tidak akan pernah merasa kekeringan ilham selama ia berada dekat dengan kehidupan.

Seniman Lekra yang lain lagi, Oey Hay Djoen menafsirkan turba sebagai apa yang disebut garis massa, yakni belajar mendengar dan menimba dari kehidupan rakyat.<sup>22</sup> Amrus Natalsya, pelukis yang juga pemimpin Sanggar Bumi Tarung menganggap turba sebagai ilmu. "Bukan ilmu melukis, tetapi dengan turba, maka lukisan itu bisa memberikan ilmu kepada penontonnya, terutama ilmu sosial. Ilmu bahwa petani itu harus dibela, bahwa feodalisme itu jelek...kalau tidak begitu, lukisan ini tidak lebih sebagai penghibur," jelas Amrus dalam buku "Tuan Tanah Kawin Muda".

<sup>20</sup> Antariksa, *op.cit*, hal. 59

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 64

Memasuki tahun 1960-an, Lekra menjadi organisasi yang lebih mapan. Penulis Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan bahwa anggota Lekra sudah berjumlah lebih dari seratus ribu orang. Klaim ini mungkin saja berlebihan mengingat Lekra tidak pernah menjalankan sistem keanggotaan resmi.

Saat Kongres Kebudayaan ke-II yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di Bandung, Lekra menempatkan rakyat sebagai akar kebudayaan. Dengan begitu, tidak ada lagi pagar antara rakyat terbawah dan rakyat terpelajar ataupun rakyat kawula dan rakyat elite.

#### 4.3. Hubungan Lekra dengan PKI

Kongres I Lekra di Solo melahirkan dan mensahkan Mukadimah Lekra yang juga mencantumkan peraturan dasarnya sebagai salah satu lembaga kebudayaan. Pada kongres ini, Lekra menunjukkan sikap sesungguhnya yang membentuk langkah-langkah dan visi berkesenian dan berkebudayaan Lekra, yakni “seni untuk rakyat” dan “politik adalah panglima.” Seni untuk rakyat berarti, seni bukan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang saja, tapi juga dapat dinikmati oleh setiap insan dalam masyarakat. Sedangkan, politik sebagai panglima berarti setiap karya seni seharusnya menyampaikan aspirasi rakyat, sebab, kehidupan rakyat, termasuk seni, tidak lepas dari kehidupan berpolitik. Seperti Amir Pasaribu, komponis dan penyanyi Lekra ini katakan:

*”Seniman tidak berpolitik, itu benar, tidak berpolitik gerakan subversif. 1001 kali seniman tidak berpolitik, 1001 kali pula politik akan mencampuri seni dan seniman.”*<sup>23</sup>

Selain itu, para seniman Lekra juga beranggapan bahwa kesalahan politik lebih parah daripada kesalahan artistik. Seniman berpolitik ibarat melakukan negosiasi hak dan kewajiban berkesenian, bangkit dan turut membantu bangsa dan rakyatnya jika diserobot oleh bangsa lain melalui berbagai jalan pengrusakan. Karena itulah, para seniman Lekra kemudian menyebut dirinya sebagai seniman pejuang atau pejuang-pejuang seniman yang menentang segala bentuk ketidakadilan.

---

<sup>23</sup> Rhoma, *op.cit*, hal. 26

Dengan sikap ini, Lekra kemudian mengembangkan sayap pergerakannya ke masyarakat luas. Organ-organ tani dan buruh, seperti SOBSI dan BTI pun diberi tempat untuk mengucurkan aspirasi dan apresiasi kebudayaan. Ini sesuai dengan salah satu pernyataan Lekra sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan yang campur-baur darimana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan.”*

Selain itu, Lekra juga menerapkan Gerakan 1-5-1 yang menjadi basis dari lima kombinasi kerja: *satu*, meluas dan meninggi; *dua*, tinggi mutu dan ideologi; *tiga*, tradisi baik dan kekinian revolusioner; *empat*, kreativitas individual dan kearifan massa; *lima*, realisme sosial dan romantik revolusioner. Untuk menjalankan kelima hal tersebut, maka diperlukan metode turun ke bawah atau kerap disingkat turba. Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan mempelajari kebenaran yang hakiki mustahil bila didapatkan dari khayalan-khayalan yang diperoleh dari tumpukan buku dan lamunan, melainkan kehidupan langsung dari rakyat.<sup>25</sup>

Berdasarkan nilai-nilai itulah karya-karya seniman Lekra lahir. Mereka menyebutnya realisme sosialis, artinya, realisme yang didasarkan pada tujuan sosialisme. Dengan kata lain, realisme sosialis mempertahankan dan mengembangkan antikapitalisme internasional. Pandangan ini adalah terusan dari filsafat materialisme, yaitu materialisme – dialektik – historis yang mampu melihat kontradiksi struktural fundamental dalam kehidupan sosial antara kelas dominan dan kelas yang didominasi, kelas penghisap dan kelas terhisap, kelas penindas dan kelas tertindas.<sup>26</sup> Intinya, Lekra secara tegas menunjukkan keberpihakannya kepada kelas yang kalah dalam struktur masyarakat. Disinilah, Lekra memiliki kedekatan ideologis dengan PKI. Selanjutnya lahirlah polemik bila Lekra *onderbouw* dari PKI atau sekadar sekawan dalam pemahaman ideologi, khususnya di bidang kebudayaan.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia* (Jakarta), 2003, hal. 18

Dalam Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) yang diadakan oleh PKI, para seniman yang masuk dalam Lekra memberikan sambutan yang isinya tidak menyebutkan keterlibatan Lekra sebagai institusi. Melainkan, partisipasi mereka secara personal dalam konferensi tersebut. Memang tak dapat dipungkiri bahwa beberapa pendiri Lekra adalah orang PKI, dan kebanyakan anggota Lekra adalah komunis, namun tidak semua anggota Lekra adalah komunis. PKI memang berusaha melakukan ‘pemerahan’ terhadap Lekra, namun para seniman Lekra tidak dengan serta merta mentaati keinginan PKI ini. Amrus Natalya, pelukis, dalam film dokumenter mengenai Lekra yang berjudul *Tjidurian 19: Rumah Budaya yang Dirampas* menyatakan, “Tidak benar orang Lekra itu satu bebek. Apa yang dikatakan di sana, di bawah juga ikut.”

Amrus juga menambahkan bahwa ada perbedaan artistik antara seniman dengan partai. Misalnya saja ketika ia menggarap lukisannya yang berjudul “Tanah adalah untuk Petani yang betul-betul Menggarap Tanah”. PKI menganggap tubuh petani di lukisan Amrus terlalu mulus. Disinilah perbedaannya, Amrus sebagai seniman melihat petani adalah manusia yang berhati halus.

Oey Hay Djoen juga menegaskan hal ini. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada ketegangan antara PKI dengan beberapa organisasi yang berusaha “dimerahkan”. Oey juga menambahkan:<sup>27</sup>

*“Jangan menganggap Lekra lahir dari PKI...idenya bukan hanya dari Njoto, Aidit, dan sebagainya. Ada M.S. Ashar dari Merdeka di sana, ada A.S. Dharta, dan sebagainya. Tidak semuanya orang komunis. Tapi yang lebih penting, sebelum Lekra berdiri sudah banyak organisasi kebudayaan, yaitu kelompok-kelompok yang berakar di masyarakat.”*

Pelukis Djoko Pekik juga mengatakan hal serupa bahwa orang Lekra belum tentu orang PKI, karena para seniman Lekra kerap tidak suka menerima perintah. Djoko mengatakan, “Kita itu sebagai seniman kan butuh kreativitas juga. Kalau selalu menuruti partai, itu terasa gersang. Terasa kering.”

---

<sup>27</sup> Antariksa, *op.cit*, hal. 36

Sutopo, komponis Lekra juga menyetujui pendapat Djoko. Sutopo mengeluhkan sedikitnya waktu untuk berkreasi. Waktu mereka banyak disita untuk pembuatan spanduk dan plakat kegiatan perjuangan.

Oey Hay Djoen kemudian bercerita, awalnya, PKI melakukan upaya pemerahan melalui jalur-jalur organisasi, seperti kongres. Ketika gagal, barulah PKI membentuk organisasi baru. Kegagalan PKI 'memerahkan' Lekra inilah yang kemudian membuat PKI membentuk lembaga kebudayaannya sendiri, yang bernama Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR).<sup>28</sup>

Lekra memang tidak dapat dikatakan bersih dari PKI. Tetapi, juga bukan berarti berinduk pada PKI. Kesepahaman ideologi antara Lekra dan PKI menempatkan Lekra dalam posisi yang terfasilitasi. Contohnya saja, karya tulisan seniman Lekra kerap dimuat di surat kabar *Harian Rakjat* milik PKI. Gantinya, Lekra memberikan dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI, seperti pawai massa dan kongres. Secara pragmatis, Lekra dan PKI saling membutuhkan. Apalagi PKI memiliki kedekatan dengan Soekarno. Hasil kedekatan itu juga membuahakan pelarangan distributor film-film Amerika yang dianggap oleh Lekra merusak moral bangsa.

PKI sendiri juga merasakan buah kedekatannya dengan Lekra. Melalui Lekra-lah, PKI mampu menjangkau rakyat. Pada Pemilu 1955, PKI menempatkan diri pada urutan keempat lantaran mampu memperoleh 16,4 persen dari 37 juta suara.<sup>29</sup>

Tahun 1950-an hingga 1960-an, merupakan masa keemasan bagi PKI. Ia merupakan partai politik terbesar dan partai komunis terbesar di Asia Tenggara.<sup>30</sup> Inilah yang mempertajam persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat, yang juga berkeinginan untuk menguasai tampuk kekuasaan.

Asvi Warman Adam dalam bukunya yang berjudul *Membongkar Manipulasi Sejarah* menyatakan bahwa tragedi 1965 perlu dilihat sebagai konsekuensi permusuhan komunisme dengan Islam sejak 1948.<sup>31</sup> Selanjutnya, persaingan antara Angkatan Darat dengan PKI lahir. AD meningkat pamornya

---

<sup>28</sup> Rhoma, *op.cit*, hal. 52

<sup>29</sup> Antariksa, *op.cit*

<sup>30</sup> Antariksa, *op.cit*, hal. v

<sup>31</sup> Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah* (Jakarta, 2009), hal 155



ketika berhasil menumpas PRRI/Permesta pada tahun 1958. Eksistensi tentara sendiri dalam dunia politik lalu diakui ketika Dekrit Presiden digulirkan pada tanggal 5 Juli 1959. PKI sendiri, dalam pemilu 1955, berhasil meraih suara keempat. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, kekuasaan politik di Indonesia terpusat pada Soekarno, PKI, dan AD.

Budiawan dalam bukunya yang berjudul *Mematahkan Warisan Ingatan* menuliskan kutipan pidato Aidit yang menyatakan bahwa tuan tanah haji menyalahgunakan ajaran agama untuk memperluas tanah milik mereka. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September tahun 1960. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah Indonesia, yang mendapat tanah pampasan dari pemerintah kolonial Belanda, membagi-bagikan tanah seluas 5 hektar kepada rakyatnya. Setiap kepala keluarga hanya diwajibkan mendaftarkan untuk mendapatkan haknya ini. Masalah kemudian timbul karena para haji atau kaum Muslim, kemudian mendaftarkan nama keluarganya yang lain, seperti anak, menantu, dan kerabatnya yang lain, selain namanya sendiri. Hasilnya, mereka mendapat jatah tanah lebih dari 5 hektar banyaknya. Para petani pun menjadi korban. Mereka tidak mendapat jatah tanah, lantaran sudah diserobot terlebih dahulu oleh para haji. Akibatnya, mereka pun hanya menjadi petani penggarap belaka.

PKI berusaha meluruskan hal ini. Mereka kemudian mengadakan berbagai aksi, seperti demonstrasi dan kampanye, yang bertujuan menekan pemerintah agar melaksanakan UUPA dengan benar. Dengan kata lain mereka meminta agar hak tanah para petani dikembalikan.

Para haji tentu tidak suka dengan langkah-langkah PKI ini, namun para petani mendukung gerakan PKI. Suasana semakin memanas yang berujung pada bentrok fisik antara barisan petani penggarap yang didukung PKI, dengan para haji pemilik tanah yang didukung Angkatan Darat. Bentrok fisik ini memakan banyak korban jiwa, sebagian besar dari mereka adalah para haji. Dari sinilah kemudian muncul sikap anti PKI dan antek-anteknya.<sup>32</sup>

Peristiwa 30 September semakin menebalkan garis persaudaraan antara kelompok Islam dan Angkatan Darat. Mereka pun kemudian bersatu

---

<sup>32</sup> Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan* (Jakarta, 2004), hal. 108

mengganyang PKI dan segala sesuatu yang dianggap berkaitan.<sup>33</sup> Walau bukan *underbouw* PKI, Lekra sebagai sekawan dalam ideologi pun terkena imbas. Berikut ini adalah kiprah Lekra dalam dunia politik yang mendekatkan Lekra dengan PKI.

#### **4.3.1. Lekra dalam Aksinya Mewujudkan UUPA 1960**

Sebelum Undang-undang Pertanahan pada tahun 1960, tanah pertanian yang dikelola para petani adalah tanah pertanian milik desa. Terjadinya perpindahan hak kelola para petani atas tanah pertanian yang dikelola, karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah pertanian sebagai hak milik. Pemilihan tanah pertanian difasilitasi oleh kepala desa dan pemilihan tersebut dilakukan di masing-masing desa. Bagi para petani yang sudah mengelola tanah pertanian, mendapat nomor urut dan dapat menentukan lokasi tanah pertanian yang diminati sesuai dengan petakan tanah yang sebelumnya dikelola.

Pada tahun 1964, informasi tentang pelaksanaan UUPA mulai menyebar sampai di tingkat desa. Selanjutnya upaya penerapan UUPA semakin gencar dilakukan. Pesta demokrasi pemilihan kepala desa pun semakin memarakan penerapannya. Kelompok yang PKI dan PNI yang kalah dalam pemilihan kepala desa kemudian membentuk organ baru yang bernama Barisan Tani Indonesia (BTI). BTI sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat barisan petani dalam masyarakat yang sebelumnya belum ada.

BTI lalu kerap melakukan pengkaderan dengan jalan menarik simpati petani. Pemberian bantuan pupuk dan bantuan serupa pun dilakukan. Lambat laun, BTI juga mulai mengarahkan para petani untuk menentang kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa berkaitan dengan sertifikasi tanah tanpa melakukan konversi terlebih dahulu.<sup>34</sup> Bagi kelompok BTI, penerapan UUPA 1960 sebagai program besar pemerintah tentunya mendukung secara positif. Akan tetapi, sebelum penetapan tanah pertanian menjadi tanah hak milik, konversi tanah sangat penting untuk dijalankan terlebih dahulu. Konversi tanah yang dimaksud oleh kelompok

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Program sertifikasi tanah merupakan program andalan kepala desa saat itu, akan tetapi, sertifikasi tanah yang dimaksud tanpa melalui konversi tanah terlebih dahulu.

BTI adalah mencoba mengembalikan para pengelola tanah pertanian kepada tanah awal yang dulu pernah dikelolanya. Dengan demikian, upaya sertifikasi tanah untuk menjadikan tanah pertanian tersebut sebagai tanah pribadi dapat berjalan seimbang dan tidak hanya menguntungkan bagi sebagian orang yang saat itu kebetulan menempati tanah pertanian subur.

Walau begitu, upaya perolehan sertifikat tanah cenderung dianggap meyalutkan petani. Proses pembuatan sertifikat tanah pertanian harus mendapat persetujuan dari kepala desa, kecamatan, dan diteruskan ke kantor Agraria. Bagi para petani, proses urus-mengurus sertifikat tanah dianggap sangat membingungkan dan berbelit-belit, sehingga para petani mengalami kesulitan. Sampai pada batas waktu yang dijanjikan, sertifikat tanah yang telah dipesan oleh beberapa petani belum memperlihatkan hasilnya. Berbagai alasan serta banyaknya kekurangan administrasi ditemui disana-sini.

Mahalnya biaya sertifikasi tanah, tidak adanya kejelasan terhadap sertifikat yang dimaksud serta tidak dilaksanakannya konversi tanah pertanian sebelum dijadikan hak milik justru menimbulkan kemarahan besar dari pihak BTI. Mereka menggelar aksi demonstrasi yang ditujukan kepada kepala desa.

Pembagian tanah adalah salah satu program kebijakan yang diusung oleh golongan komunis. Undang-undang No. 2 tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil, Undang-undang No. 5 tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok agrarian dilengkapi dengan Perpu No. 56 tahun 1961 dan Komando Presiden tanggal 1 Januari 1961 mengenai perubahan tanah menjadi landasan penggerak pelaksanaan tanah. Substansi kebijakan itu sendiri mengarah pada *Land Reform* yang mencakup:

1. Pembatasan luas maksimum kepemilikan atau penguasaan tanah
2. Penghapusan hak-hak sementara yang mengandung unsur-unsur penghisapan (gadai, sewa, bagi hasil)
3. Penetapan batas maksimum luas tanah milik (didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk).

*Land Reform* adalah salah satu cara pengimplementasian revolusi Indonesia berdasarkan Tap MPRS No. II tahun 1960 pasal 4 ayat 3 yang berbunyi: "*Land Reform adalah bagian mutlak daripada revolusi Indonesia; oleh*

*karenanya tujuan Land Reform dengan sendirinya sama dengan tujuan revolusi itu.”*

Pembagian tanah pada kaum tani berdasarkan UUPA memberikan harapan akan peningkatan daya beli kaum tani, sehingga penghasilan nasional akan lebih merata. Sedangkan, kekuatan revolusi yang dimaksud dalam Tap MPRS adalah seluruh rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan politik dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya, lahir lah rumusan tujuh setan desa sebagai musuh petani, yaitu tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat.

UUPA sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948.<sup>35</sup> Panitia Agraria terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walau begitu pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan dukungan dari aparat keamanan. Tentu saja hal ini melahirkan peristiwa-peristiwa berdarah, seperti peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten. Selanjutnya, peristiwa ini disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Tidak itu saja, di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dan Nadlathul Ulama (NU). Kiai-kiai NU yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI untuk membagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah. Keributan ini kemudian berlanjut hingga melibatkan Muhammadiyah.

Bagi Lekra, implementasi dari pelaksanaan *Land Reform* adalah turba atau turun ke bawah. Para seniman Lekra turun ke desa-desa dan membaaur dengan kehidupan masyarakat di desa, lalu menuangkannya dalam hasil karya mereka. Hasil sidang pleno Lekra mengukuhkan dukungan terhadap macetnya pelaksanaan *Land Reform* tersebut: “*Benar-benar mengintegrasikan diri dengan kaum tani dan terutama sekali kaum tani miskin dan kaum tani tak bertanah, dengan jalan turun ke bawah dan menjalankan tiga sama.*”

---

<sup>35</sup> Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria*, 1 (Jakarta, 1999), hal. 3

Gerakan kebudayaan baru yang digalang pada Konferensi Nasional I Lekra yang diselenggarakan di Solo pada tahun 1959 adalah gerakan pemberantasan keterbelakangan dan kemaksiatan di desa yang diproduksi oleh agen-agen lokal perusak yang disebut tujuh setan desa. Para seniman, berdasarkan gerakan ini, kemudian melakukan integrasi total seniman yang terdiri dari sastrawan, pelukis, dan pekerja-pekerja budaya termasuk kaum tani dan buruh. Selanjutnya, memproduksi drama rakyat, cukil kayu, poster, lagu, dan tari revolusioner yang bisa menjadi senjata di tangan kaum tani.<sup>36</sup> Hal ini adalah satu dari penunjukkan sikap Lekra untuk mendukung kaum tani secara fisik dan moral.

Salah satu contoh bentuk dukungan yang pernah dilakukan Lekra adalah ludruk. Lekra pernah mengadakan ludruk di Prambon yang mementaskan lakon berjudul “Gusti Allah Dadi Manten” (Allah menjadi pengantin). Isinya menceritakan seorang raja yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Contoh lainnya, lukisan karya Amrus Natalsya berjudul “Peristiwa Jengkol” pada tahun 1960. Lukisan ini menggambarkan peristiwa bentrokan berdarah antara pengusaha tebu yang didukung militer dengan kaum tani di Jengkol, Jawa Timur. Para petani ini terpaksa melawan, karena haknya dirampas atas tanah yang sebetulnya dijamin oleh UUPA. Misbach Thamrin, seniman yang aktif bergelut di Sanggar Bumi Tarung –sanggar seni dalam Lekra, mengatakan:

*“Oleh karena itu, pelukis (seniman) tidak hanya bicara seni semata. Apa artinya seni kalau masyarakat kita masih belum berubah. Tugas mendesak seniman adalah turut serta ambil bagian untuk berjuang mengubah masyarakat sesuai cita-cita revolusi, yaitu masyarakat yang menikmati KEMERDEKAAN.”*

#### **4.3.2. Lekra dalam Perjuangan Perkembangan Kebudayaan Nasional**

*“Dengan kegotongroyongan nasional berporoskan Nasakom memperhebat ofensif Manipolis di bidang kebudayaan dan dengan penuh tanggung jawab menyelamatkan kebudayaan nasional kita dari serangan-serangan kebudayaan imperialisme, terutama kebudayaan imperialis AS.”* (Hasil Sidang Pleno Lekra)

---

<sup>36</sup> Rhoma, *op.cit*, hal 45

Merajalelanya film-film produksi Amerika yang bertemakan bandit dan seks membuat masyarakat resah. Bisa diduga, tema ini membuat anak-anak menggandrunginya. Pemutaran film di pagi hari juga mendorong anak-anak sengaja tidak masuk sekolah untuk menonton film dewasa. Darmini, seorang aktivis Gerwani menuliskan keluh kesahnya bahwa Amerika adalah negara nomor satu pengimpor kekerasan dan imaji perang.<sup>37</sup> Samandjaja, anggota Pimpinan Pusat Lekra mengamini pernyataan tersebut. Ia menyebut para pengedar dan mereka yang setuju dengan film-film tersebut sebagai “kaum iseng” yang melihat kebudayaan.<sup>38</sup>

Lekra, sebagai sebuah lembaga kebudayaan yang mengusung politik sebagai panglima, memang kerap menilai secara kritis kebudayaan, termasuk film, karena menganggap film memiliki pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan perilaku masyarakat. Njoto dalam sebuah pidatonya sebagai Pimpinan Pusat Lekra dalam Konferensi Nasional Lembaga Film Indonesia (LFI) mengatakan bahwa LFI adalah sebuah organisasi pekerja-pekerja film yang bukan saja tak menabukan politik, melainkan mengutamakan politik dan artisitet sekaligus, politik progresif, politik kerakyatan, dan artisitet kerakyatan. Dalam hal ini, Lekra secara tegas menyatakan sikap bahwa LFI tidak boleh bersikap steril.

Dimulai pada tahun 1920, Belanda memasukkan film-film Amerika untuk mengembangkan rasialisme di Indonesia. Selanjutnya, Belanda mengizinkan para pedagang Tionghoa memasukkan film-film yang berbau tahayul dari Tiongkok. Tujuannya agar rakyat Indonesia tenggelam dalam pengaruh mistik. Film tahayul pertama berjudul “Lutung Kasarung” lalu dibuat oleh pedagang Tionghoa sekitar tahun 1926. Berikutnya, film tahayul berjudul “Tjandi Borobudur” dengan aktris dari Hongkong. Keluarisan film tersebut mendorong para pedagang Tionghoa membuat film-film serupa yang sarat dengan fantasi, perkelahian, nyanyian, dan romantik.

Masuknya Jepang ke Indonesia mempengaruhi dunia perfilman. Jepang menggunakan film sebagai alat propaganda politik. Bukan hanya film, semua unsur kebudayaan diarahkan untuk hal itu. Ketika Jepang kalah dan menyerah

---

<sup>37</sup> *Harian Rakjat*, 23 Februari 1955

<sup>38</sup> *Harian Rakjat*, 1 Mei 1959

pada tahun 1945, para pekerja film Indonesia mengambil alih peralatan dan menjadikannya modal awal pembuatan berita film Indonesia. Sejak itulah watak revolusioner dalam film Indonesia lahir. Perusahaan Film Negara (PFN) lalu memproduksi film-film bercorak semi dokumenter dan pendidikan nasional, seperti “Si Pintjang,” “Pulang,” “Rentjong,” dan lain sebagainya.

Lekra sendiri berkeyakinan bahwa film adalah hasil paduan ilmu dan moral. Oleh karena itu, Lekra tidak bisa mentolerir orang-orang yang memperlakukakan film. Film-film Amerika yang tak senonoh menggambarkan manusia diluar komunitasnya dan menyebarkan nilai-nilai yang mengerdilkan moral bangsa. Ujung-ujungnya, film menjadi alat pemerias, penindas, dan pengembang rasialisme yang mendukung kepentingan politik penguasa negara-negara imperialis. Bagi Lekra, film adalah bangunan atas dari alas dasar ekonomi dan kekuasaan politik.

Pada kurun waktu 1950-1955, film Amerika merajai pemutaran film bioskop di Indonesia. Akibatnya, film nasional menjadi tamu dirumahnya sendiri. Ketua Panitia Sensor Film, Utami Suryadarma dalam *Harian Rakjat* pada tanggal 23 Juni 1962 menyatakan, dalam kurun waktu 1960-1961, ada 130 judul film Amerika yang beredar. Selanjutnya, Jepang (59), India (30), Italia (25), Cina (25), Pakistan (24), Inggris (20), Hongkong (15), Uni Sovyet (10), Singapura (5), Jerman Barat (2), Perancis (1), Lebanon (1), Korea Utara (1).

Joebaar Ajob, budayawan yang juga sekretaris umum Lekra menyatakan akan mengikis seluruh film impor, khususnya dari negara-negara imperialis. Bioskop Indonesia, masih menurut Joebaar, tak ubah bioskop yang secara de facto dikuasai Amerika dan Inggris. Bila berhasil memenangkan, maka kemenangan itu membawa empat aspek sekaligus, yaitu kemenangan ekonomi, kemenangan politik, kemenangan kebudayaan nasional, dan kemenangan nafkah.<sup>39</sup> Film, bagi Lekra, harus menjadi alat revolusi yang bisa mencerminkan perjuangan rakyat. Artinya, film harus bisa mendorong dan membangkitkan sikap revolusioner rakyat untuk terus maju menyelesaikan revolusi.

Percikan api dengan *America Movie Picture Association of Indonesia* (AMPAI) diawali ketika PPFII melakukan penutupan studio film pada 22 Maret

---

<sup>39</sup> *Harian Rakjat*, 12 Mei 1964

1957. Studio film seperti Persari, Perfini, Singabuana, Bintang Surabaya, Golden Arrow, Tan & Wong Bros, dan Olympiad, ditutup dengan alasan terhentinya kucuran dana dari pemerintah. Tentu saja keputusan tersebut mendapat tentangan besar-besaran dari kalangan seniman dan organ-organ yang bersimpati pada perfilman Indonesia, khususnya mereka yang tergabung dalam Lekra.

Pada 8 April 1957, Lekra mengadakan pertemuan yang melahirkan tiga butir pernyataan sikap, yaitu: *pertama*, masalah film bukanlah masalah golongan manusia, melainkan masalahnya semua rakyat Indonesia dari segala golongan dan lapisan, termasuk pemerintah; *kedua*, penutupan studio-studio film seperti yang terjadi sekarang ini bukanlah penyelesaian yang sebaik-baiknya dan menurut kenyataan malahan justru mengakibatkan kesulitan-kesulitan lainnya; dan, *ketiga*, sikap yang tepat adalah pembentukan suatu dewan film yang menjamin adanya syarat-syarat perkembangan di lapangan film, baik secara kulturil maupun secara komersil.<sup>40</sup>

Lekra rupanya menganggap peristiwa penutupan ini sebagai peringatan bagi diperlukannya konsolidasi kekuatan untuk menandingi kekuatan yang mengemukakan mental bahwa sebuah bidang kerja cukup dilakukan oleh yang berwenang. Lekra, diwakili Amir Pasaribu dan Bachtiar Siagian, menyatakan ketegasan sikapnya bahwa urusan film bukan semata urusan orang yang berkecimpung di dunia film. Melainkan urusan bangsa yang sedang berjuang dan melakukan percobaan-percobaan untuk maju.<sup>41</sup> Dengan kata lain, Lekra menggugat tindak penutupan itu sebagai sikap anti-nasional.

Kongres Nasional I di Solo pada tahun 1959 menunjukkan bahwa Lekra menuntut pelaksanaan otonomi daerah agar kebudayaan rakyat berkembang baik. Selanjutnya, Lekra melakukan pembentukan direktori lengkap seluruh karya musik dan tari rakyat di seluruh daerah; mengintensifkan pendidikan musik dan tari dengan jalan kampanye lewat penerbitan, penyiaran, seminar, dan sebagainya; serta menggiatkan pencegahan dan pemberantasan pencabulan serta gejala-gejala dekaden dalam musik dan tari. Di bidang film dan seni drama, Lekra menyorot lembaga-lembaga perfilman yang dekaden dan menstimulir untuk merombak

---

<sup>40</sup> *Harian Rakjat*, 10 April 1957

<sup>41</sup> *Harian Rakjat*, 13 April 1957



struktur Panitia Sensor Film, dan menuntut pembubaran dewan film yang dianggap tidak punya nyali untuk memajukan perfilman nasional.<sup>42</sup>

Pada Konferensi Nasional II di Jakarta tahun 1964, Soekarno menyerukan pemberantasan segala kebudayaan asing yang gila-gilaan; dan, bahwa yang mesti dibangun adalah kebudayaan sendiri dan kepribadian sendiri. Lekra, di bidang film, lalu menyokong pemboikotan terhadap film-film asing, seperti Amerika dan juga India yang dianggap mewakili citra imperialis. Selanjutnya, membangun gerakan revolusioner anti film imperialis, Panitia Aksi Boikot Film Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS), dan menyerukan pengusiran sindikat film Amerika di Indonesia, yaitu AMPAI.

Sidang Pleno menunjukkan sikap politik Lekra yang tegas dalam mengganyang agen-agen kebudayaan imperialis Amerika, seperti musik ngak-ngik-ngok, *twist*, dan lain sebagainya. Seruan ini ditujukan jelas-jelas kepada AMPAI, lembaga yang tidak hanya dianggap sebagai distributor film Amerika, melainkan juga agen kebudayaan yang mengatur infiltrasi perusakan moral revolusi.

Ketua Lembaga Film Indonesia, Bachtiar Siagian di hadapan peserta KSSR menyatakan bahwa PABFIAS tidak hanya menuntut pembubaran AMPAI, tapi juga peningkatan aksi boikot terhadap film-film Amerika. Karena, ada anggapan bahwa Amerika melalui AMPAI berusaha melakukan legalisasi agresi kebudayaan atas Indonesia. Tidak sampai di situ saja, Pengurus Pusat Lekra lalu menyerukan agar pemboikotan film dilanjutkan ke pemboikotan musik:

*“Rakyat Asia Tenggara bukan hanya akan meneruskan perlawanan, tetapi pasti juga akan mengusir AS. Lekra atas nama 500ribu anggotanya mendesak kepada Pemerintah RI agar Paviliun Indonesia di New York Fair ditutup dan agar aksi boikot film-film AS diluaskan juga ke music ngak-ngik-ngok. Perkuat persatuan revolusioner, kalahkanlah kebiadaban gansterisme AS!”<sup>43</sup>*

Dominasi dalam perfilman ini tidak hanya mendesak permodalan film dalam negeri, tapi juga bidang politik. AMPAI mendiktekan film-film yang

<sup>42</sup> Rhoma, *op.cit*, hal. 42

<sup>43</sup> *Harian Rakjat*, 7 Agustus 1964

beredar di Indonesia. Inilah bukti yang kemudian diajukan oleh Lekra bahwa AMPAI adalah agen penyebar politik imperialis. SPD Lekra Jawa Barat menggulirkan pernyataan akan dukungan atas aksi pemuda, pelajar, dan mahasiswa-mahasiswa Bandung yang melakukan penyetopan terhadap pemutaran film Amerika di bioskop Dewo pada tahun 1964. Mereka bahkan mengusulkan untuk meningkatkan aksi boikot film menjadi penolakan total film-film Amerika.<sup>44</sup> Pramoedya Ananta Toer lalu mengeluarkan pernyataan keras:

*“Gerakan ini mencoba menanamkan inferior-complex bahwa tanpa film imperialis AS, rakyat Indonesia bakal kelaparan dan mati. Gerakan ini jelas tidak mempunyai kepentingan dengan pembangunan film nasional, jelas merupakan gerakan revisi untuk melawan Manipol, Usdek, dan TAVIP.”<sup>45</sup>*

Aksi ini kemudian memuncak pada tanggal 16 Maret 1965. Gedung AMPAI di jalan Sagara resmi diambil alih oleh massa artis, pekerja dan pengusaha film, seniman, sastrawan, dan pekerja-pekerja kebudayaan. Inilah yang kemudian menjadi akhir dari perjalanan panjang melawan AMPAI selama 15 tahun.

#### **4.4. Ambang Kehancuran Lekra**

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1965, membawa PKI menjadi rekanan politik yang diandalkan oleh Soekarno. Saat pasukan Angkatan Darat gagal dalam misinya di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dalam gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia, Soekarno merasa Angkatan Darat tidak bisa lagi diandalkan untuk menjalankan tugas yang ia berikan. Sejak itulah Soekarno kemudian berpaling kepada PKI. Soekarno merasa PKI lebih bisa dipercaya ketimbang Angkatan Darat. Pengalihan kepercayaan inilah yang memperuncing perseteruan antara PKI dan Angkatan Darat, yang memang sudah terasa gejalanya sejak peristiwa Madiun 1948.

Gerakan 30 September atau kerap disingkat G30S, memang merupakan puncak perseteruan antara Soekarno bersama dengan PKI, dengan Angkatan Darat.

<sup>44</sup> *Harian Rakjat*, 27 September 1964

<sup>45</sup> TAVIP, yaitu singkatan dari Tahun *Vivere Pericoloso* yang artinya tahun yang berbahaya. Isitilah ini kerap digaungkan oleh Soekarno dalam pidato-pidatonya. Lihat *Harian Rakjat*, 6 September 1964

Peristiwa G30S ini sendiri masih menyisakan misteri hingga kini. Ada beberapa analisa mengenai peristiwa G30S ini.<sup>46</sup> *Pertama*, Angkatan Darat mengeluarkan versi bahwa PKI adalah otak dari G30S melalui lembaga yang dibentuk oleh D.N. Aidit dengan nama Biro Khusus. Syam Kamaruzzaman ditempatkan sebagai ketua biro ini, dan selanjutnya menyusun rancangan kudeta dengan tujuan mencegah Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan selepas Soekarno.

*Kedua* adalah versi yang disampaikan oleh Benedict R. Anderson, Ruth T. McVey dan Frederick P. Bunnell dalam bukunya yang berjudul *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* pada tahun 1971. Kedua sarjana dari Universitas Cornell ini menyatakan bahwa PKI sudah memiliki posisi yang mantap dalam kancah politik Indonesia dengan dukungan kuat dari Soekarno sebagai presiden. Karena itu, PKI akan lebih memilih mempertahankan *status quo*. Dengan begitu, keterlibatan PKI dalam G30 S dianggap sebagai kebetulan belaka. Dalang sebetulnya adalah Angkatan Darat.

Versi *ketiga* adalah hasil dari persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa para tokoh PKI yang diduga terlibat. Isinya mengenai adanya perwira progresif untuk menghadapi isu dewan jenderal.

Para anggota Lekra kemudian ditangkap setelah peristiwa 30 September 1965 ini. Walau Lekra mati-matian menyangkal bahwa mereka bukanlah ormas bentukan PKI. “Tidak semua anggota Lekra adalah anggota PKI, dan bahkan komunis,” begitu sanggah para anggota Lekra. Namun bantahan hanya tinggal bantahan. Para anggota Lekra tetap ditangkapi, diperiksa, disiksa, dan banyak dari mereka dibuang ke Pulau Buru untuk kurun waktu yang tak tentu. Sisanya? Menjalani kehidupan dengan predikat komunis: Penjahat bangsa yang biadab. Kartu Tanda Penduduk mereka diberi cap ET yang merupakan singkatan dari Eks-Tahanan Politik. Ruang gerak politik dan intelektual pun dibatasi.<sup>47</sup>

Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha –dua harian yang diperbolehkan terbit pada saat itu, adalah dua media yang menyebutkan

<sup>46</sup> John Roosa, *Dalih pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (Jakarta, 2008), hal. 169

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Martin Aleida pada bulan Desember 2008 di Jakarta. Martin adalah salah satu anggota Lekra yang turut ditangkap namun cukup beruntung untuk tidak mengalami pembuangan ke Pulau Buru. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Putu Oka Sukanta, penyair Lekra yang mengalami pembuangan ke Pulau Buru.

keterlibatan Lekra pada peristiwa G30S. Dua harian ini memang tidak banyak menyebut nama Lekra, namun, mereka menyebut Lekra memberi dukungan pada G30S. Contohnya, pada artikel harian Angkatan Bersenjata 9 November 1965. Halaman 2 harian ini menyebutkan, Kantor Lekra di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, digunakan untuk mengatur strategi G30S. Sebelumnya, harian Berita Yudha tanggal 22 Oktober 1965, menerbitkan tulisan yang isinya mengatakan, telah ditemukan dokumen penting di markas Lekra di Jalan Cidurian, Jakarta Pusat, yang diduga juga berkaitan dengan masalah ini.

Martin Aleida, salah satu saksi dan pelaku sejarah, adalah buah dari stigmatisasi negara terhadap Lekra. Menurut Martin, ia dan juga anggota Lekra yang lain, selalu dipenuhi rasa takut dan was-was setelah peristiwa G30S. Membaca kalimat “PKI dan Ormas-Ormasnya” di media massa, sudah membuat hati ciut. Sebab, saat itu, kata “ormas” sudah cukup merujuk ke Lekra, walau Lekra bukanlah *underbouw* PKI. Stigma ormas ini pulalah yang bisa membawa seseorang ke dalam penjara, sebuah penjara yang penuh dengan siksaan fisik.

Penulis puisi dan novel, Putu Oka Sukanta pernah mengalami siksaan fisik yang luar biasa semasa di tahanan. Menurut cerita Martin, tubuh Putu hancur lebur akibat cambukan ekor pari. “Putu tidak bisa tidur sehari-hari, karena kesakitan. Punggungnya penuh dengan luka siksaan hingga ia tidak bisa tengkurap,” cerita Martin.

Putu Oka Sukanta dalam kesaksiannya di film *Tjidurian 19* mengatakan, ia tidak tahu sama sekali saat peristiwa G30S meletus. Putu yang saat itu menjadi Guru mengaku pergi mengajar seperti biasa. “Siang hari itu, jumlah murid yang datang sedikit. Saya tanya ke salah satu murid yang bernama Mei, dimana teman-temannya yang lain. Mei lalu balik bertanya, apa saya tidak tahu ada peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal semalam. Saat itulah saya baru tahu peristiwa itu,” paparnya.

Meski baru tahu belakangan –kalah cepat dengan salah seorang muridnya, Putu, bersama dengan T. Iskandar, dan Martin Aleida, kemudian ditangkap di sebuah rumah yang mereka tempati bersama, beberapa bulan setelah peristiwa G30S. Mereka bertiga lantas dibawa ke sebuah gedung di Jalan Budi Kemuliaan, yang kini menjadi gedung kantor Indosat, di Jakarta Pusat. Disinilah Putu disiksa.

T. Iskandar dalam film *Tjidurian 19*, mengatakan, demi keselamatan teman-temannya, Putu kemudian terpaksa mengakui semua hal yang dituduhkan kepadanya.

Martin Aleida selamat dari siksaan fisik di penjara ini. Martin bahkan dibebaskan, lantaran aparat menemukan surat ayahnya yang akan berangkat naik haji, di kantong baju yang ia kenakan. Surat itu melepaskan tuntutan terhadap dirinya sebagai antek komunis. Namun, meski selamat dari siksaan fisik, Martin tak selamat dari siksa sosial. Stigma sebagai komunis dan antek PKI, menjauhkan dirinya dari masyarakat. Ia sulit mencari pekerjaan. Martin, yang sebelum peristiwa G30S adalah seorang wartawan, tidak bisa kembali ke profesi lamanya. Ia tidak bisa kembali menulis, sebab ada larangan berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1381 Tahun 1965 yang menyatakan, anggota Lekra tidak bisa bekerja di media. Martin Aleida, Putu Oka Sukanta, T. Iskandar, Hersri Setiawan, Amarzan Loebis, dan lainnya, harus menelan pahit keputusan ini.

Untuk menyambung hidup, Martin pun pernah menjalani beberapa pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan tulis-menulis, seperti penjaga empangan dan penjaga toko pakaian jadi. Namun itu semua tidak memuaskan jiwanya. Keinginan untuk terus menulis terus membara. Lantas, pada sekitar tahun 1968-1969, Martin yang memiliki nama asli, Nurlan mencoba mengirimkan karya sastranya ke majalah *Horizon* dengan nama samaran: Martin Aleida. Karya tersebut dimuat. Sejak itulah ia menggunakan nama tersebut. Stigma telah memaksa seorang Martin mengganti namanya. Hanya dengan cara inilah ia dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan nuraninya.

Penulis-penulis lain yang bergabung dengan Lekra mengalami nasib serupa dengan Martin. Putu Oka Sukanta sempat bekerja sebagai ahli akupuntur. Saat ia menerbitkan tulisannya, ia pun mengganti namanya menjadi Putu Oka. Hersri Setiawan bekerja sebagai penerjemah lepas di beberapa media dengan nama-nama samaran, semisal Slamet, Larasati atau Srikandi. Namun kemudian ia dipecat setelah identitas aslinya diketahui.

Pramoedya Ananta Toer, Amarzan Loebis, dan banyak anggota Lekra kemudian dibuang ke Pulau Buru. Usai menjalani penghukuman, stigma itu tetap melekat hingga mereka harus mengubah nama, stigmatisasi bahwa Lekra adalah

antek PKI. Menurut Martin, ini adalah sebuah kelalaian hukum yang berakibat pada pelanggaran hak azasi manusia. Mereka, anggota Lekra, ditangkap tanpa ada dokumen dan tuntutan yang jelas. Bukti bahwa Lekra sebagai pendukung PKI pun nihil ditemukan.<sup>48</sup> Martin pun menambahkan, ia dan teman-temannya di Lekra bahkan tidak tahu mengenai Biro Khusus. “Jangankan berpartai, aturan 1-5-1 saja, saya sering tidak ikuti ketika menulis. Saya ikuti aturan saya saja. Seniman itu kan tidak bisa diatur,” kata Martin.

Anggota Lekra yang lain, seperti pelukis dan komposer tidak luput dari tekanan akibat stigma ini. Perupa Amrus misalnya. Sebagai pelukis, ia memang tidak mendapat larangan untuk melukis, namun ia sulit menjual hasil karyanya. Tidak ada orang yang mau membeli, karena takut dicurigai sebagai pemberi donor bagi gerakan komunis. Sudharnoto, pencipta lagu Garuda Pancasila yang juga anggota Lekra, mengalami hal yang sama. Karirnya sebagai komponis berakhir begitu saja. Ujung-ujungnya, ia bekerja sebagai pemusik di café-café atau hotel, tentu saja dengan mati-matian menyembunyikan identitasnya. Jasa Sudharnoto sebagai pencipta lagu Garuda Pancasila, dilupakan begitu saja, meski karyanya terus digunakan hingga saat ini.

Tidak hanya itu saja. Hasil karya para seniman Lekra pun kerap dikaitkan dengan peristiwa G30S. Misalnya saja lagu Genjer-genjer dari Jawa Timur dituduh menjadi lagu pengiring ketika pembunuhan terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Syairnya seperti “esuk-esuk pating keleler” yang dilanjutkan dengan “neng kedhokan pating keleler” yang berarti “berhamparan” dijadikan bukti penguat bahwa peristiwa G30S yang mengakibatkan pembantaian terhadap para jenderal telah direncanakan jauh-jauh hari.

Selain lagu, puisi gubahan Mawie atau Ananta Joni bisa dijadikan contoh. Mawie melahirkan puisi berjudul *Kunanti Bumi Memerah Darah* yang lalu dimuat di harian Bintang Timoer pada tanggal 21 Maret 1965. Puisi ini menceritakan penderitaan seorang perempuan miskin yang tinggal di pinggir sungai Ciliwung. Dari judulnya, puisi ini diartikan seorang perempuan malang yang tinggal di tepi sungai Ciliwung, dan melahirkan jabang bayi tanpa bantuan bidan. Walau begitu, puisi ini digugat sebagai rencana peristiwa berdarah G30S. Kata “memerah darah”

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Martin Aleida pada hari Senin, 23 November 2009

dinilai sebagai peristiwa berdarah tersebut. Walau begitu, Asvi Warman Adam, sejarawan dan peneliti LIPI mengatakan bahwa Mawie, ketika ditanyakan langsung, menjawab bahwa sajak tersebut mungkin ia kirimkan sebelum keberangkatannya belajar ke Beijing pada tahun 1964. Ia bahkan tidak pernah membayangkan peristiwa G30S dalam puisi ciptaannya.

#### 4.5. Proses Politik Stigmatisasi Terhadap Lekra di Media Massa

Pemerintah Orde Baru (1966-1998) melalui kuasa Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), dengan segala cara, memang berusaha menanamkan alur peristiwa G30S. Salah satunya melalui hegemoni media massa. Caranya: *Pertama*, membatasi kebebasan media massa. *Kedua*, mengatur tataran pemberitaan. Dengan begitu, penguasa Orde Baru berusaha menanamkan kebencian terhadap PKI dan ormas-ormasnya yang semuanya mengarah kepada pembasmian komunisme. Hal ini dilakukan mengingat Angkatan Darat memiliki potensi konflik kepentingan politik dengan PKI yang berbenderakan komunisme.<sup>49</sup>

Stigmatisasi politik adalah hal yang kerap terjadi ketika kelompok dominan secara politik, yaitu penguasa, hendak meyingkirkan kelompok yang dianggap berbahaya bagi dirinya. Akibatnya bisa berujung pada pengeksklusian hak-hak politik, sosial, dan ekonomi dari para anggota kelompok tersebut. Hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Indonesia pasca kolonialisme memang mengalami gejolak-gejolak politik yang dahsyat. Peristiwa Gerakan 30 September adalah satu diantaranya. Peristiwa politik ini tidak hanya berhenti pada saat itu, tapi terus berlanjut dengan perpindahan bentuk yang makin lama makin halus. Bahkan tak tampak. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai oleh pemerintah Orde Baru, tindak penghancuran dan pembunuhan karakter menimpa mereka yang dianggap musuh Orba.

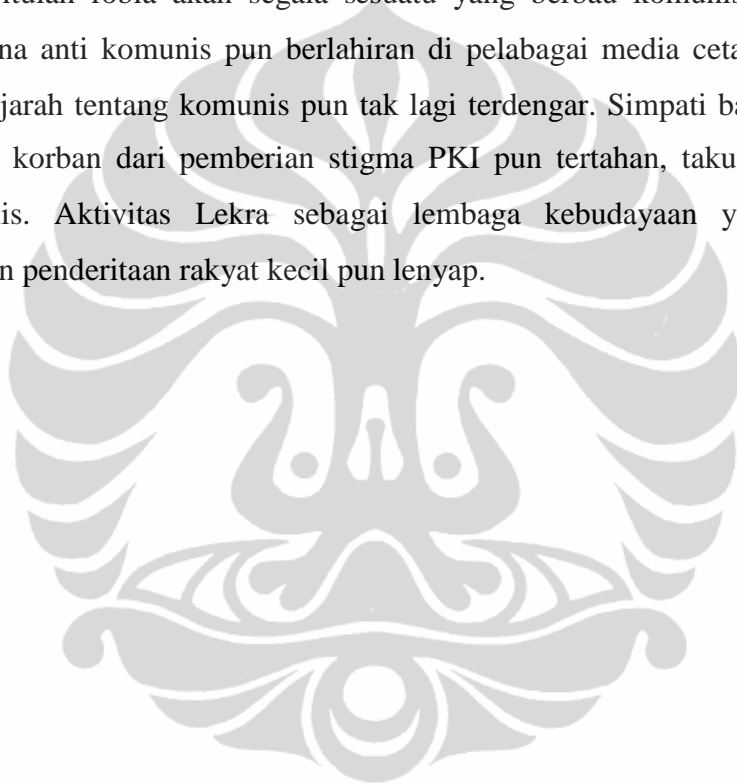
Hal ini tidaklah lepas dari kolaborasi kekuatan cikal bakal negara oleh Orba dengan kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadikan komunis sebagai musuh bersama pada masa itu. Pemerintah Orba bahkan terus menggunakan

---

<sup>49</sup> H. Rosihan Anwar, *Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965* (Jakarta, 2007), hal. 343

alasan tersebut dalam beberapa dekade pemerintahannya. Mereka yang menentang 'kebijakan' Orba kemudian diberi stigma sebagai PKI. Penguasa membangun stabilitas politik dengan penciptaan musuh bersama, yaitu stigmatisasi terhadap Lekra sebagai salah satunya. Selanjutnya, penguasa menyebarkan stigma tersebut berupa ideologi melalui media massa. Tak dapat dipungkiri, media massa adalah media yang tepat bagi proses penyapaan yang memuat penempatan individu atau kelompok dalam sebuah relasi sosial.

Sejak itulah fobia akan segala sesuatu yang berbau komunis melanda. Wacana-wacana anti komunis pun berlahiran di pelbagai media cetak maupun elektronik. Sejarah tentang komunis pun tak lagi terdengar. Simpati bagi mereka yang menjadi korban dari pemberian stigma PKI pun tertahan, takut dianggap antek komunis. Aktivitas Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang kerap menggaungkan penderitaan rakyat kecil pun lenyap.





## BAB 5

### WACANA ANTI KOMUNIS DALAM PEMBERITAAN DI HARIAN ANGKATAN BERSENJATA DAN BERITA YUDHA 1965- 1966

Bab ini menyajikan 133 artikel yang dimuat di harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha dari Oktober 1965 hingga Juli 1966. Dengan begitu, dapat memberikan gambaran mengenai proses stigmatisasi oleh negara terhadap Lekra melalui media.

#### 5.1. Harian Angkatan Bersenjata

Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 1 November 1965 menerbitkan artikel yang berjudul: “Apa itu operasi tutup mulut?”. Artikel ini memuat kisah mengenai seorang laki-laki, anggota dari SOBSI yang menyembunyikan latihan-latihan militer di Lubang Buaya untuk persiapan G30S. Latihan ini diikuti oleh PKI dan ormas-ormasnya. Masih di halaman yang sama, juga dimuat artikel mengenai PKI sebagai anti Pancasila.

Pada tanggal 2 November 1965, Brigjen Surjosumpeno menyatakan bahwa Gestapu harus dilenyapkan, semua oknum, ormas, dan parpol harus ditumpas, serta peristiwa G30S adalah masalah nasional, bukan masalah internal AD. Kecaman terhadap G30S ini juga datang dari masyarakat di seluruh penjuru kota, dan bahkan juga anak-anak kecil. Halaman 2 kemudian menunjukkan secara tegas bahwa PKI adalah dalang dari G30S. Simak saja pernyataan pada alinea pertama artikel ini:

*“Pengakuan-pengakuan para tahanan serta dokumen yang telah dapat disita oleh pihak yang berwajib telah menguatkan pembuktian bahwa PKI betul-betul terlibat dan mendalangi gerombolan kontra revolusi G30S...”<sup>50</sup>*

Tak dapat dipungkiri bahwa PKI pada masa itu adalah partai besar yang menguasai dunia politik Indonesia. Beberapa anggotanya bahkan menempati pos-

---

<sup>50</sup> *Angkatan Bersenjata*, 2 November 1965, hal. 2

pos penting dalam pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Njoto adalah salah satu dari anggota PKI yang juga terlibat dalam pendirian Lekra terkena imbas pemecatan sebagai anggota DPRGR. Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 3 November 1965 memuat berita pemecatan ini. Daftar hitam G30S berupa upaya aksi pembunuhan terhadap ratusan orang di Garut juga dimuat. Berita ini dilanjutkan dengan artikel yang berjudul “Bersihkan Gestapu yang Bersarang di RT-RT dan RK-RK”. Selain itu, Editorial pada tanggal ini memuat bahwa ABRI tidak menyenangi partai seperti PKI yang dianggapnya mau menang sendiri. Bahkan ditambahkan lagi bahwa rasa senang itu bukan hanya dari pihak ABRI, melainkan juga dari semua pihak.

Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) mendesak pemerintah untuk mengisolir pimpinan dan aktivis G30S dari Masyarakat. Mereka juga juga menuntut *shaping* dan *reshaping* semua aparatur negara. SOKSI bahkan mendesak Soekarno untuk melakukan indoktrinal mental terhadap simpatisan G30S hingga ke pelosok-pelosok desa.<sup>51</sup>

Di lingkungan maritim, 1371 orang diberhentikan. Menko Ali Sadikin mengeluarkan keputusan sehubungan hal tersebut. Ia membekukan kegiatan, seperti Serikat Buruh Pelajaran (SPP), Serikat Buruh Maritim Indonesia (SBMI), Barisan Nelayan Indonesia (BNI), dan Serikat Istri Pelaut Indonesia.<sup>52</sup> Selanjutnya, di Klaten, sejumlah 3000 anggota PKI dan ormas-ormasnya menyerahkan diri. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui rencana kudeta yang dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. Mereka menyadari bahwa PKI telah memperkosa nama Tuhan dan agama. Mereka merasa dikelabui. Di Surakarta, Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata bahkan melaporkan bahwa PKI beserta seluruh ormas dan orpol di wilayah tersebut membubarkan diri. Sikap ini disusul di Tawangmangu dan Wonogiri.

Dokumen berisi rancangan rencana gerakan perusakan juga ditemukan. Selain itu, dokumen tersebut juga memuat penugasan pasukan yang disebut Kucing Hitam untuk merusak rumah-rumah penduduk. Lalu, adanya pasukan Kancing Hitam yang terdiri dari perempuan-perempuan Gerwani yang bertugas

---

<sup>51</sup> *Angkatan Bersenjata*, 3 November 1965, hal. 2

<sup>52</sup> *Ibid*

membujuk rayu tokoh partai lainnya bergabung dengan PKI; dan, pasukan Gaok yang merupakan singkatan dari Gerakan Anti Orang Kaya.<sup>53</sup>

Mayjen Soeharto, dalam menghadapi G30S, mengatakan untuk mengerahkan kekuatan secara simultan. Bukan itu saja, Soeharto juga mencetuskan untuk melakukan pemencilan, baik secara fisik dan mental, terhadap oknum-oknum yang terlibat G30S.

PKI dan ormas-ormasnya menguasai politik Indonesia juga dilancarkan di bidang seni dan budaya. Lagu Genjer-genjer – hasil gubahan Muhammad Arief, komponis Lekra - yang diidentikkan dengan lagu PKI juga dikatakan menjadi lagu yang banyak dinyanyikan pada saat sebelum eksekusi di Lubang Buaya.<sup>54</sup>

Editorial dalam harian Angkatan Bersenjata tanggal 5 November 1965 (hal. 1) memuat bahwa ABRI akan menguasai keadaan. Walau begitu, Soeharto menyatakan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam pengganyangan Nekolim dan Gestapu.

Srikandi Lubang Buaya. Demikian julukan bagi para perempuan yang terlibat peristiwa G30S. Ibu Jamilah, salah seorang anggota Pemuda Rakyat - ormas PKI – yang tertangkap mengatakan bahwa ia dipaksa untuk mengikuti latihan militer di Lubang Buaya. (Angkatan Bersenjata, 5 November 1965) Ia juga menyatakan bahwa ia dan teman-teman perempuannya diberi pisau untuk menusuk para jenderal.

Berita bahwa PKI dan ormas-ormasnya dianggap sebagai dalang dari G30S menuai reaksi para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk kemudian melakukan aksi demo berisi

<sup>53</sup> *Angkatan Bersenjata*, 4 November 1965, hal. 1

<sup>54</sup> Lagu Genjer-genjer diciptakan oleh Muhammad Arief, komponis yang tergabung dalam Lekra, yang berasal dari Banyuwangi pada tahun 1960-an. Arief membuat lagu ini berdasarkan penderitaan rakyat yang dijajah Jepang pada masa itu. Kebanyakan kaum laki-laki diambil pergi, sedangkan hasil bumi Banyuwangi yang limpah ruah dirampas oleh Jepang. Akhirnya, rakyat, demi memenuhi asupan pangan, mengambil dan memunguti tanaman genjer dari sawah untuk dikonsumsi. Padahal tanaman genjer yang banyak tumbuh di sawah ini sebelumnya dianggap sebagai tanaman pengganggu. Tahun 1962, Njoto, seniman Lekra yang juga anggota PKI ini datang ke Banyuwangi dan senang ketika mendengar lagu ini. Oleh Njoto, lagu ini dibawa ke ibukota untuk disebarluaskan di TVRI. Lilis Suryani dan Bing Slamet adalah artis terkenal yang kemudian menyanyikannya. Lagu ini kemudian menjadi hits dan dianggap sebagai lagu nasional, karena menunjukkan potret rakyat yang menderita, namun tetap bersemangat hidup. Setelah G30S meletus, Arief sendiri mati dibunuh oleh gerakan anti PKI pada tahun 1966-1967. Lihat *Angkatan Bersenjata*, 4 November 1965, hal. 1

tuntutan pembubaran PKI. (hal.1) Tuntutan tidak hanya berhenti di situ. Ormas-ormas yang dianggap *underbouw* PKI juga dituntut untuk ditumpas. Hal ini berlanjut hingga pembersihan keanggotaan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Anggota PWI yang termasuk anggota PKI dan ormas-ormasnya diberhentikan. (Angkatan Bersenjata, 5 November 1965, hal. 1)

Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang digulirkan oleh Soeharto bahwa PWI harus menendang keluar oknum yang terlibat Gestapu.<sup>55</sup> Ia menyatakan bahwa pers memiliki peran yang menentukan. Oleh sebab itu, PWI harus membersihkan diri dari G30S hingga ke akar-akarnya. Ia juga menyampaikan terima kasih pada semua pers yang telah berjuang bersama TNI/ABRI dan rakyat. Peristiwa G30S atau kerap disebut juga Gestapu adalah peristiwa di luar kemanusiaan. Editorial juga menyatakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya telah bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk merubah struktur negara Indonesia yang Pancasila menjadi komunis.<sup>56</sup> Sepak terjang ini tidak diketahui oleh Badan Pusat Intelijen (BPI). Jenderal A.H. Nasution lalu menyarankan untuk melakukan perbaikan badan-badan intelijen agar peristiwa seperti G30S tidak terulang lagi. Walau begitu, bukan hanya BPI seorang yang terkelabui oleh PKI dan ormas-ormasnya. Scotland Yard dan CIA pun tidak mengetahui adanya rencana aksi G30S.<sup>57</sup>

Memang ada keraguan yang timbul mengenai ketidakkompakkan ABRI sebelum peristiwa G30S meletus. Namun, setelah G30S, orang mulai terbuka matanya akan kekompakkan ABRI sebagai pengabdian dan alat revolusi. ABRI bahkan menjalin kekompakkan dengan kekuatan-kekuatan rakyat, parpol, dan ormas untuk menegakkan revolusi Indonesia. Peristiwa tersebut telah melekatkan Angkatan Bersenjata pada umumnya, khususnya Angkatan Darat. Hal ini terlihat dari anggota-anggota AD yang sempat berpihak ke aksi kudeta tersebut dengan kembali ke pangkalannya. Mereka menyadari kesalahan yang mereka buat.<sup>58</sup> Eks anggota PKI dan ormas-ormasnya di daerah Tanjung Morawa bahkan turut menyerahkan diri untuk kembali kepada Pemimpin Besar Revolusi Soekarno.

<sup>55</sup> *Angkatan Bersenjata*, 6 November 1965

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Angkatan Bersenjata*, 8 November 1965, hal. 1

Kongres PWI ke-12 di Jakarta mengeluarkan ketetapan mengenai kriteria wartawan G30S.<sup>59</sup> PWI menyatakan bahwa anggota yang terlibat dengan PKI dan ormas-ormasnya dipecat. Demikian juga harian atau majalah yang penerbitnya tersangkut G30S diberhentikan.

PWI tidak sendirian. Editorial Angkatan Bersenjata yang berjudul “ABRI Kompak sebagai Pengabdian dan Alat Revolusi” memuat tentang kekompakan ABRI dan pengabdian ABRI terhadap rakyat dalam penumpasan G30S. Salah satu aksi penumpasan oknum-oknum G30S diberi nama operasi Jaya Tumpas di Tangerang yang terdiri dari ABRI, hansip, front pemuda, didukung massa.<sup>60</sup> Selain itu, Ketua PNI cabang kabupaten Sukabumi dan ketua cabang kota Sukabumi, Sudiana dan Suriya ditangkap, karena tegas-tegas membela G30S. Lebih lanjut, Direktur Utama BPU Timah, Brigjen R. Pirngadie menyatakan telah melakukan pembersihan dengan cara membekukan aktivitas SBTI, ormas yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung G30S. Drs. Achmad Ramli Harahap, Pembantu Menteri Koordinator Pelaksana Ekonomi Terpimpin menandakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya telah mengacaukan pelaksanaan ekonomi terpimpin.

Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 9 November 1965 memuat berita bahwa salah satu ormas *underbouw* PKI, Lekra, telah menyediakan kantor di daerah Tebet, Jakarta Selatan sebagai tempat persiapan pelaksanaan G30S. Para anggota PKI, PR, dan Gerwani yang berjumlah sekitar 50 orang berkumpul di kantor Lekra untuk menerima arahan dan senjata.<sup>61</sup> Operasi Jaya, dalam operasi penumpasannya, menemukan oknum-oknum G30S di Tangerang.

PNI bahkan menyatakan memiliki bukti bahwa PKI dan ormas-ormasnya sebagai biang keladi G30S.<sup>62</sup> Editorial mencantumkan bahwa peristiwa G30S adalah peristiwa yang diotaki oleh PKI. Massa sebanyak 14 juta orang di Jakarta bahkan mendesak untuk menghukum oknum-oknum yang terlibat G30S.

Laksamana Muda Sri Muljono yang menjabat sebagai Men/Pangau pada masa itu menyatakan bahwa peristiwa G30S adalah peristiwa yang mendurhakai

---

<sup>59</sup> *Angkatan Bersenjata*, 9 November 1965, hal. 2

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>62</sup> *Angkatan Bersenjata*, 10 November 1965, hal. 1

Pancasila.<sup>63</sup> Revolusi Indonesia memang didasarkan pada falsafah Pancasila. Sikap Radio Peking yang menentang penumpasan G30S, yaitu oknum PKI dan ormas-ormasnya bisa dianggap sebagai sikap turut campur urusan dalam negeri yang tidak perlu diributkan. Laksamana Madya Martadinata selaku Menteri/Pangal sendiri mengatakan untuk membela revolusi mati-matian demi menggagalkan maksud jahat Nekolim dan Gestapu. Ia juga mensinyalir masih adanya musuh-musuh revolusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya aksi-aksi kekerasan, seperti penyerbuan, penculikan, pembunuhan, dan bahkan penyembelihan oleh Pemuda Rakyat. Misalnya saja di Sumatera Barat.<sup>64</sup> Limapuluh pemuda dari Pemuda Rakyat menyerbu umat Islam yang sedang sembahyang di surau, lalu menculik dan menyembelih tiga dari empat orang tersebut. Kejadian serupa terjadi di Pariaman yang menyerang seseorang dalam perjalanan ke rumah kekasihnya. Ia diserang dari belakang dengan pisau.

Editorial Angkatan Bersenjata terbitan tanggal 18 November 1965 menyatakan bahwa masyarakat masih perlu bersikap waspada pasca peristiwa G30S, sekaligus menegaskan bahwa Pancasila adalah *the way of life* dari bangsa Indonesia. Peristiwa G30S adalah peristiwa yang sudah direncanakan oleh PKI dan ormas-ormasnya, dan mereka juga sudah memiliki rencana-rencana penjagalan dimana-mana.

RPKAD menemukan bahwa PKI dan ormas-ormasnya merencanakan pembunuhan missal. Komando Gabungan yang dibentuk bahkan menemukan mayat dalam kuburan yang berserakan, seperti di Surakarta, Klaten, dan Boyolali.<sup>65</sup> Pada terbitan tanggal 20 November 2009, halaman pertama, Editorial memuat bahwa rakyat sudah *emoh* terhadap PKI dan ormas-ormasnya. Hal ini disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua NU, K.H. Ahmad, dan Ketua PNI, Ali Sastroamidjojo, SH. Mereka secara tegas menolak kemungkinan lahirnya neo-PKI.

Dr. J. Leimena selaku Wakil Perdana Menteri juga mengungkapkan hal serupa. Leimena menyatakan bahwa negara harus menindak tegas setiap oknum

<sup>63</sup> *Angkatan Bersenjata*, 11 November 1965, hal. 1

<sup>64</sup> *Angkatan Bersenjata*, 12 November 1965, hal. 1

<sup>65</sup> *Angkatan Bersenjata*, 19 November 1965, hal. 1

yang terlibat dalam G30S. Hal ini perlu dilakukan agar suasana tenang dan tertib dapat terpelihara.<sup>66</sup> Hal ini dilakukan mengingat belum semua pemimpin PKI tertangkap.<sup>67</sup> Brigjen Amir Mahmud mengatakan bahwa beberapa pimpinan militer sudah mati tertembak, tapi masih ada yang berkeliaran.

Soekarno sendiri selaku Presiden dan Panglima Tinggi mengutuk peristiwa G30S yang disebutnya dengan Gestok. Ia menyatakan ketegasannya untuk menindak semua oknum yang terlibat, baik untuk diadili maupun bila perlu ditembak mati. Hal ini disampaikan oleh Soekarno di hadapan para mahasiswa Indonesia di Istora Senayan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Trikora.<sup>68</sup> Mayjen Soeharto juga menambahkan untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap para tokoh Gestapu. Ia juga menyatakan akan adanya operasi secara teitorial untuk membersihkan pengaruh dan anasir di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Pernyataan Irjenpol Sutjipto Judodihardjo, Menteri/Pangak juga seakan mengamini hal tersebut.<sup>69</sup> Sutjipto mengatakan untuk terus menumpas Gestapu/PKI.

Pancasila sebagai falsafah negara semakin menerima dukungan dengan dibentuknya Deklarasi pendukung Pancasila yang diusung oleh Badan Koordinasi Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu. Badan ini sendiri terdiri dari parpol dan ormas yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>70</sup> Kolonel Sarwo Eddie, Danrem RPKAD, dalam harian Angkatan Bersenjata tanggal 5 Januari 1966 menyatakan bahwa mereka yang mengingkari Pancasila akan hancur.<sup>71</sup> Pernyataan ini disampaikan Sarwo Eddie dalam suatu konferensi pers di Jawa Tengah. Sarwo sendiri sedang dalam penugasan penumpasan G30S saat itu.

Al-Ahram menyatakan bahwa peristiwa Gestapu/PKI adalah sikap yang menomorsatukan kepentingan partai dan menomorduakan kepentingan nasional. Aksi PKI dan ormas-ormasnya ini, masih kata Al-Ahram, telah mendorong lahirnya reaksi kuat dari rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari adanya pembakaran gedung PKI oleh para demonstran.

---

<sup>66</sup> *Angkatan Bersenjata*, 20 Desember 1965, hal. 1

<sup>67</sup> *Angkatan Bersenjata*, 21 Desember 1965, hal. 1

<sup>68</sup> *Angkatan Bersenjata*, 22 Desember 1965, hal. 1

<sup>69</sup> *Angkatan Bersenjata*, 23 Desember 1965, hal. 1

<sup>70</sup> *Angkatan Bersenjata*, 31 Desember 1965, hal. 1

<sup>71</sup> *Ibid*

Laksamana Muda Udara Wiriadinata, Komandan gabungan Pendidikan PARA juga menyatakan bahwa untuk meneruskan aksi pembersihan terhadap oknum yang terlibat Gestapu/PKI.<sup>72</sup> Soekarno menyetujui untuk melakukan pembentukan tim-tim Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah memeriksa Njono dan Untung yang dianggap sebagai gembong-gembong Gestapu/PKI.<sup>73</sup> A. Astrawinata, Menteri Kehakiman memberikan keterangan bahwa ada oknum-oknum Gestapu yang hendak menyusup ke dalam Barisan Soekarno. Oleh sebab itu, kewaspadaan harus terus dijalankan agar tidak ada kesempatan menyusup.<sup>74</sup> Kekhawatiran ini juga menyelimuti masyarakat di dunia Islam yang mengirimkan utusan yang diwakili Organisasi Islam Asia Afrika (OIAA). Utusan ini diterima oleh Jenderal A.H. Nasution di kediamannya.<sup>75</sup>

Brigjen Amir Mahmud selaku Pangdam V/Jaya/Pepelrada mengatakan untuk melarang memuat tulisan atau karangan hasil karya oknum-oknum yang terlibat G30S.<sup>76</sup> Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono, Wakil Panglima Besar KOTI urusan ekonomi/Menko Ketua badan Pengawas Keuangan, bahwa Gestapu/PKI adalah inflasi musuh utama yang harus dibasmi.<sup>77</sup>

Soeharto, dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan rapat kerja para ahli psikologikal di jalan Merdeka Barat No. 14, Jakarta pusat, menyatakan penyesalannya terhadap peristiwa G30S, dan mengingatkan untuk selalu mengobarkan Pancasila dalam dada setiap rakyat.<sup>78</sup>

Pangdam VI Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie dalam harian Angkatan Bersenjata tanggal 8 Februari 1966 bahwa pers Indonesia harus dibersihkan dari mental Gestapu. Editorial di tanggal yang sama juga menyatakan bahwa para mahasiswa belajar hingga sambil memikul bedil, sehingga dapat dikatakan mereka adalah pelajar pejuang.

<sup>72</sup> *Angkatan Bersenjata*, 11 Januari 1966, hal. 1

<sup>73</sup> *Angkatan Bersenjata*, 28 Januari 1965, hal. 1

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Angkatan Bersenjata*, 31 Januari 1966, hal. 1

<sup>76</sup> *Angkatan Bersenjata*, 4 Februari 1966, hal. 1

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Angkatan Bersenjata*, 5 Februari 1966, hal. 1



Soeharto menandakan bahwa Gestapu adalah peristiwa yang didalangi oleh PKI, dan PKI telah melakukan tiga kejahatan sekaligus: kejahatan kriminal, kejahatan politik, dan kejahatan terhadap moral Pancasila.<sup>79</sup> Sujono, seorang saksi peristiwa G30S, menyampaikan di Mahmilub adanya pelatihan-pelatihan tenaga di Lubang Buaya dari tanggal 28 hingga 30 September 1965. Pelatihan tersebut berdasarkan permintaan PKI beserta mantel organisasinya.<sup>80</sup> Sujono sendiri adalah Danrem Pasukan Pertahanan Angkatan Udara yang diduga terlibat G30S. Pangdam V/Jaya Brigjen. Amir Mahmud mengingatkan masih ada oknum-oknum yang berkeliaran, sehingga masih perlu bersikap waspada.<sup>81</sup> Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen Ryacudu dalam artikel yang berjudul “Gestapu Harus Ditumpas Sampai ke Akar-akarnya” menyatakan bahwa penelitian serta pembersihan personil dan unsur-unsur negatif Gestapu harus digiatkan dan dilakukan secara tegas hingga ke akar-akarnya.<sup>82</sup>

Jenderal A.H. Nasution menyampaikan untuk melakukan pembersihan gerilya seni budaya oleh oknum Gestapu/PKI.<sup>83</sup> Aksi penumpasan G30S ini juga diusung oleh para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dengan menyampaikan tuntutan kepada MPRS. Para mahasiswa tersebut mendesak untuk segera dilakukan pelarangan terhadap komunisme di Indonesia, karena beranggapan komunisme tidak sejalan dengan Pancasila, khususnya sila pertama.<sup>84</sup> Harian Angkatan Bersenjata terbitan tanggal 2 Juli 1966 pada halaman 1 memuat bahwa pada saat itu, MPRS sendiri sedang giat mengadakan rapat siang-malam untuk membahas ketetapan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Pelarangan terhadap PKI dan ormas-ormasnya ini kemudian disahkan dalam aturan yang bernama Tap MPRS No. XXV pada tahun 1966. Tap ini juga mencantumkan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.<sup>85</sup>

---

<sup>79</sup> *Angkatan Bersenjata*, 14 Februari 1966, hal. 1

<sup>80</sup> *Angkatan Bersenjata*, 17 Februari 1966, hal. 1

<sup>81</sup> *Angkatan Bersenjata*, 18 Februari 1966, hal. 1

<sup>82</sup> *Angkatan Bersenjata*, 24 Februari 1966, hal. 1

<sup>83</sup> *Angkatan Bersenjata*, 12 Mei 1966, hal. 1

<sup>84</sup> *Angkatan Bersenjata*, 25 Juni 1965, hal. 1

<sup>85</sup> *Angkatan Bersenjata*, 6 Juli 1966, hal. 1

## 5.2. Harian Berita Yudha

Soekarno dalam pertemuannya dengan para komandan unsur tempur dan kesatuan lainnya setelah peristiwa G30S menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah peristiwa yang berdasarkan persoalan politik.<sup>86</sup> Tadjuk dalam harian Berita Yudha mengukuhkan pernyataan Soekarno selaku Presiden dan Panglima tertinggi itu dengan menuliskan G30S sebagai petualang kontra revolusi. Pada masa itu, Indonesia memang sedang mengalami kepungan ancaman dari neokolonialisme yang kerap disebut nekolim. Oleh sebab itu, segala bentuk sikap politik Indonesia bisa dikatakan mengarah pada sikap revolusioner. Hal ini nampak dari penyebutan yang diberikan kepada Soekarno: Pemimpin Besar Revolusi.

Pengkhianatan terhadap revolusi Indonesia ini menuai tuntutan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan media terkait. Salah satu tuntutan diajukan oleh Pengurus Pusat Badan Perjuangan Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia yang disampaikan kepada Presiden Soekarno.<sup>87</sup>

Peristiwa G30S dianggap sebagai peristiwa hasil dari permainan politik yang membahayakan Pancasila sebagai falsafah negara.<sup>88</sup> Seperti sudah diketahui, PKI adalah partai yang berideologikan komunisme, dan ini dicap sebagai bentuk sikap anti Tuhan yang notabene anti Pancasila, khususnya sila pertama. Berita Yudha pada tanggal 18 Oktober 1965 lalu memuat artikel yang mencantumkan pembekuan Komite Perdamaian Indonesia (Komperda). Hal ini disampaikan oleh Ratu Aminah Hidajat selaku ketua. Lebih lanjut, Ratu Aminah menerangkan bahwa hal ini perlu dilakukan mengingat 85% dari Komperda dikuasai oleh golongan partai, ormas, dan orpol yang terlibat dalam G30S.

Peristiwa G30S tidaklah didalangi PKI semata. Ormas-ormas *underbouw*-nya juga turut terlibat. PNI, dalam harian Berita Yudha tanggal 22 Oktober 1965, mengatakan bahwa ia mendapatkan fakta peristiwa G30S dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya. Salah satunya adalah Lekra yang menyimpan dokumen-

---

<sup>86</sup> *Berita Yudha*, 6 Oktober 1965, hal. 2

<sup>87</sup> *Berita Yudha*, 12 Oktober 1965, hal. 1

<sup>88</sup> *Berita Yudha*, 18 Oktober 1965, hal. 1

dokumen penting berkaitan dengan peristiwa tersebut di gudangnya yang terletak di jalan Cidurian, Jakarta Pusat.<sup>89</sup>

Tujuh partai politik, yaitu PSII, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, PERTI, NU, PNI ditambah dengan Golongan Karya dan Muhammadiyah lalu mengajukan tuntutan agar PKI dan ormas-ormasnya dinyatakan terlarang. Tuntutan ini didukung juga oleh Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Modern di Yogyakarta, Senat Mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan/Komperindra, DPRGR Dati II Balikpapan, Resimen Pembangunan Mahasiswa Yogyakarta, Majelis Koperasi Batik Pekalongan, Gabungan Perusahaan Sejenis Farmasi, Direksi dan pegawai Bank Negara, ormas/buruh/karyawan PN Satya Niaga, Angkatan 45 Dati I Jawa Barat, Kubu Pancasila, dan lain sebagainya. Mereka menuntut pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya.<sup>90</sup>

Salah satu ormas yang juga disebut terlibat dengan PKI dan G30S adalah Lekra. Hal ini dinyatakan dalam artikel yang dimuat di Berita Yudha pada tanggal 25 Oktober 1965. Brigjen. Ryacudu yang menjabat Pangdahan/Pepelrada Kalimantan Barat mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 19 Oktober 1965 yang berisi nama ormas-ormasnya. Isinya mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan ormas-ormasnya PKI antara lain, pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Nelayan Indonesia (BNI).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Arudji Kartawinata, Pimpinan DPRGR, bahwa dilakukan pembekuan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya.<sup>91</sup>

Keterlibatan Lekra dengan PKI semakin dipertajam dengan adanya larangan terhadap beberapa seniman yang tergabung dalam Lekra.<sup>92</sup> Tidak hanya itu, mahasiswa yang dianggap terlibat dalam G30S juga diberhentikan dari universitasnya. Mereka yang menerima ikatan dinas atau beasiswa juga dihentikan

<sup>89</sup> *Berita Yudha*, 22 Oktober 1965, hal. 2

<sup>90</sup> *Berita Yudha*, 23 Oktober 1965, hal. 1

<sup>91</sup> *Berita Yudha*, 25 Oktober 1965, hal. 2

<sup>92</sup> *Berita Yudha*, 27 Oktober 1965, hal. 2

segala uang tunjangan. Berita Yudha pada tanggal 2 Januari 1966 menuliskan bahwa G30S/PKI beserta ormas-ormasnya telah ketahuan telah menyusun rancangan penjagalan massal. Dokumen rancangan penjagalan tersebut ditemukan oleh ABRI di Jatinegara, Jakarta. Penjagalan itu dilakukan terhadap mereka yang dianggap menentang PKI.

PKI sebagai partai politik besar memiliki banyak anggota yang tersebar di pelbagai tempat. Salah satunya adalah media. Kolonel Harsono, Kepala Direktorat Pers dan Hubungan Masyarakat Departemen Penerangan pada masa itu mengemukakan bahwa PKI telah mendominasi pemberitaan di Kantor Berita Antara.<sup>93</sup> Oleh sebab itu, pemerintah mulai mengenalkan pers pemerintah ke tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya pers yang dibawa, pemerintah juga mengirimkan pasukannya ke Jawa Tengah dalam rangka pembersihan oknum G30S. Mayor Santosa bahkan mengatakan bahwa pasukannya disambut dengan hangat oleh rakyat di daerah-daerah.

Himbauan terhadap masyarakat sendiri kerap digaungkan. Irjenpol. Sutjipto Judodihardjo, Menteri/Pangak mengeluarkan himbauan kepada para pejabat, ABRI, dan masyarakat di Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan untuk mengutuk G30S dan untuk terus berpegang teguh pada Panca Azimat Revolusi: Pancasila. Sutjipto juga menyatakan untuk menumpas Gestapu hingga ke akar-akarnya.<sup>94</sup> Setelah penumpasan G30S, Jaksa Tinggi Jakarta Raya mengumumkan bahwa catatan peristiwa kriminal menurun menjadi 7.200 perkara, padahal pada tahun sebelumnya, tahun 1964, tercatat 8.200 perkara.

Himbauan tersebut tidak hanya di bidang sosial dan politik, melainkan juga di bidang seni dan budaya. R. Agus Djaja menyatakan dalam harian Berita Yudha, tanggal 6 Januari 1966 bahwa terror PKI dan ormas-ormasnya juga merambah ke bidang seni dan budaya. PKI memaksa setiap seniman atau pelukis untuk bergabung dengan PKI. Tolakan dari ajakan tersebut dapat berakibat pada pemampatan perolehan bahan-bahan untuk melukis, menutup pasaran, dan bahkan fitnah seperti antek nekolim dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Agus menyatakan bahwa mereka yang mengikuti PKI sudah meresapi loyalitas terhadap

---

<sup>93</sup> *Berita Yudha*, 4 Januari 1966, hal. 2

<sup>94</sup> *Berita Yudha*, 5 Januari 1966, hal. 2

golongan, bukan kepada revolusi dan bangsa. Hal ini diamini oleh Jenderal A.J. Mokoginta yang menyatakan bahwa penumpasan oknum G30S/PKI menjadi siasat utama untuk mencapai kesentausaan bangsa dan negara.

Brigjen P. Sobiran bahkan menyatakan bahwa terjadinya pemberontakan yang dimotori oleh PKI dan ormas-ormasnya ini adalah pemberontakan kedua. Hal ini terjadi karena penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 kurang bersih. Sobiran juga menyatakan untuk menumpas hingga bersih supaya tidak terulang lagi pemberontakan PKI yang ketiga.

Jenderal A.H. Nasution, salah seorang yang selamat dari peristiwa G30S dan menjabat sebagai Wapangsar KOTI, menyatakan bahwa ABRI memiliki tugas untuk menghancurkan G30S/PKI. Hal ini disampaikannya kepada *Mainichi Shinbun*, harian dari Jepang. Nasution mengatakan bahwa sikap ini perlu supaya peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

Walau peristiwa G30S sudah berlalu, Mayjen Ibrahim Adjie, Pangdam VI Siliwangi mengemukakan bahwa pemerintah belum tuntas dalam menanggulangi akibat dari peristiwa G30S. Pemerintah masih harus menyusun kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan yang terjadi.<sup>95</sup> PKI dianggap telah meracuni rakyat Indonesia untuk mendapat dukungan, seperti ormas-ormas. Gerakan seperti Gerakan Semut Merah adalah satu diantara organ dan mantel PKI yang menuruti instruksi dari PKI.<sup>96</sup>

Walau PKI berusaha meracuni rakyat, Menteri/Pangau Laksamana Muda Udara Haji Sri Muljono Herlambang mengatakan bahwa G30S hancur. Gerakan ini gagal, karena berusaha mendurhakai Tuhan dan mengkhianati Pancasila.<sup>97</sup> Mayjen Soeharto juga menyatakan bahwa G30S/PKI sudah tidak memiliki kekuatan yang berarti lagi. Pandangan serupa bahwa G30S mengkhianati Pancasila juga diusung oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.

Penyelewengan PKI dan ormas-ormasnya terhadap falsafah negara, Pancasila juga diakui oleh Ketua *Fact Finding Commission*, Mayjen. Dr. Sumarno yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam Berita Yudha tanggal

<sup>95</sup> *Berita Yudha*, 7 Januari 1966, hal. 1

<sup>96</sup> *Berita Yudha*, 9 Januari 1966, hal. 1

<sup>97</sup> *Berita Yudha*, 11 Januari 1966, hal. 1

14 Januari 1966, Sumarno dan kedelapan rekannya mengakui telah menemukan fakta-fakta tentang penyelewengan tersebut. ABRI bahkan telah menyita sejumlah dokumen yang berisi fitnahan dari PKI.<sup>98</sup>

Pada pertemuan buka puasa bersama di kediaman H. Djamaluddin Malik di Jakarta, Wakil PM III Dr. Chairul Saleh menyatakan di hadapan para pimpinan NU bahwa vonis terhadap peristiwa Gestok/PKI sangat dinanti-nantikan.<sup>99</sup> Chairul Saleh menambahkan bahwa ia berterima kasih kepada NU yang telah banyak memberikan bantuan.

Menyikapi G30S, Mayjen Soeharto menegaskan bahwa masa kristalisasi belum selesai. Pernyataan ini membenarkan pernyataan Subandrio sebelumnya yang menyatakan bahwa tahun 1965 adalah tahun kristalisasi.<sup>100</sup> Dr. Sumarno juga menyatakan hal serupa pada saat perayaan hari lahir NU ke-40. Ia menyatakan perlunya mengobarkan api Pancasila untuk membasmi sisa-sisa G30S. Penyelesaian akibat G30S juga disampaikan oleh Mayjen Soeharto dalam Berita Yudha, 29 Januari 1966. Soeharto berpendapat dibutuhkan kekompakan dari Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi, ABRI, dan rakyat. Menko Sadjarwo, SH sendiri menyatakan bahwa tuntutan pembubaran PKI adalah hal yang dapat dibenarkan mengingat PKI telah dua kali mengkhianati revolusi Indonesia.

Akibat dari meletusnya G30S, Pangdam v/Jaya Brigjen Amir Mahmud mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan semua karangan yang dihasilkan oleh oknum G30S/PKI dan pendukung-pendukungnya dilarang untuk dicetak maupun diedarkan. Selain itu, Njoto, Amarzan Loebis, dan Agam Wispi misalnya. Mereka termasuk dalam daftar orang-orang yang dipecat dari PWI.<sup>101</sup> Untuk memulihkan keamanan negara, Soeharto menyatakan adanya kebijakan yang diambil, seperti penumpasan Gestapu, penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat, dan seterusnya.<sup>102</sup> Jenderal Dr. Roeslan Abdulgani selaku Wapangsar KOTI urusan sosial politik juga mempertegas hal tersebut. Ia, dalam Berita Yudha

---

<sup>98</sup> *Berita Yudha*, 15 Januari 1966, hal. 1

<sup>99</sup> *Berita Yudha*, 22 Januari 1966, hal. 1

<sup>100</sup> *Berita Yudha*, 28 Januari 1966, hal. 1

<sup>101</sup> *Berita Yudha*, 4 Februari 1966, hal. 1

<sup>102</sup> *Berita Yudha*, 5 Februari 1966, hal. 1

terbitan 5 Februari 1966, menyatakan bahwa sisa-sisa G30S/PKI dan dalang-dalangnya menjadi sasaran pokok prasaran.

Frans Seda, Menteri Perkebunan dan Ketua Partai Katolik turut mendukung pengganyangan neo-PKI dan golongan yang berusaha menunggangi Presiden. Hal ini diucapkannya, karena mendengar akan dibentuknya partai kerakyatan.<sup>103</sup> Seda mengemukakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden untuk tidak perlu membuat wadah baru bagi sosialisme.

Peristiwa G30S memang dianggap sebagai pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Pernyataan ini digulirkan oleh Letkol. Kav. Wing Wirjawan Wirjodiprodjo kepada para anggota kavaleri berbaret hitam di lapangan jalan Hockey, Senayan, Jakarta yang termuat dalam harian Berita Yudha, 10 Februari 1966.

Soeharto menegaskan adanya oknum-oknum yang dipengaruhi oleh Nekolim dan G30S. Mereka menilai bahwa Indonesia akan dikuasai oleh Junta Militer. Soeharto menepis berita tersebut. Ia mengatakan bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak menyenangi ABRI.<sup>104</sup> Soeharto juga menyatakan bahwa PKI jelas telah melakukan perebutan kekuasaan. Lagi, Soeharto menambahkan bahwa PKI telah melakukan tiga kejahatan sekaligus: kriminal, politik, dan kejahatan terhadap Pancasila.<sup>105</sup> Hal tersebut dinyatakan oleh Soeharto di TVRI dalam rangka menyongsong sidang pertama Mahmilub. Sejak tanggal 14 Februari 1966, Mahmilub akan mulai melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadap Njono, gembong G30S/PKI.

Njono sendiri dalam sidang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap peristiwa tersebut, dan Biro Khusus PKI tidak melakukan pengiriman tenaga ke Lubang Buaya. Walau begitu, Njono, dalam kesaksiannya yang dimuat di harian Berita Yudha pada tanggal 16 Februari 1966, menyatakan bahwa DN Aidit, Lukman, Njoto, dan dirinya sendiri telah diserahkan tugas untuk membentuk tenaga-tenaga cadangan tempur. Njono juga menyatakan bahwa operasi militer hanya menjadi pengetahuan para anggota Politbiro PKI. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran rahasia.

---

<sup>103</sup> *Berita Yudha*, 9 Februari 1966, hal. 1

<sup>104</sup> *Berita Yudha*, 12 Februari 1966, hal. 1

<sup>105</sup> *Berita Yudha*, 15 Februari 1966, hal. 1

Mayor Udara Sujono atau kerap dipanggil Pak Djojo dalam kesaksiannya yang dimuat di *Berita Yudha* pada tanggal 17 Februari 1966 mengatakan bahwa peristiwa G30S sebagai upaya PKI untuk menyingkirkan Presiden. Hal ini diucapkannya dalam persidangan Njono di Mahmilub.

Upaya PKI untuk menyusun kembali kekuatan terkuak. Letnan Kardiat, pimpinan pasukan operasi pembersih di wilayah Kombi, Sulawesi juga mengatakan bahwa pasukannya menemukan dokumen berisi rancangan rencana PKI dan beberapa antek PKI di wilayah tersebut. Namun, penyergapan berhasil dilakukan dengan adanya dukungan dari rakyat.<sup>106</sup> Walau begitu, kekhawatiran bahwa masih ada antek PKI dan ormas-ormasnya melakukan gerilya politik. Peringatan ini disampaikan oleh Pangdam V/Jaya kepada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Pangdam mengingatkan untuk selalu bersikap waspada terhadap aksi gerilya-gerilya tersebut.<sup>107</sup>

Harian *Berita Yudha* pada tanggal 22 Februari 1966 lalu memuat bahwa Mahmilub telah menjatuhkan vonis mati kepada Njono. Mahmilub menyatakan bahwa bukti telah menunjukkan Njono tergabung dalam gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan, dan berusaha menyingkirkan presiden.

Kesaksian Njono dalam sidang Mahmilub juga dikatakan sebagai tipu muslihat PKI beserta antek-anteknya.<sup>108</sup> Isu adanya Dewan Jenderal adalah isu yang kerap disebut-sebut oleh Njono, Untung, dan sebagian besar saksi. Letkol Herman Lechman, Perwira Penerangan Komandan Pendidikan AD seluruh Indonesia (KOPLAT) mengatakan bahwa PKI membabi buta menyebut rapat militer sebagai Dewan Jenderal. Pernyataan yang disampaikan Herman dalam rapat pendidikan berkala AD di Akademi Hukum Militer di Jakarta dimuat dalam harian *Berita Yudha*, tanggal 1 Maret 1966.

Harian *Berita Yudha* pada tanggal 4 Maret 1966 juga masih menyatakan kekhawatiran yang sama. Pangdam V/Jaya, Brigjen Amir Mahmud menyatakan kekhawatirannya akan pasukan-pasukan liar G30S/PKI yang berkeliaran, dan memerintahkan untuk menghancurkannya. Salah satu contoh upaya pemberantasan adalah menghukum mati mereka yang dianggap pentolan dari

---

<sup>106</sup> *Berita Yudha*, 18 Februari 1966, hal. 1

<sup>107</sup> *Berita Yudha*, 19 Februari 1966, hal. 1

<sup>108</sup> *Berita Yudha*, 1 Maret 1966, hal. 1



G30S. Sebut saja, Letkol Untung dan Njono.<sup>109</sup> Tindakan ini dipertegas kembali dengan adanya instruksi dari Presiden untuk larangan menampung anggota eks PKI ke dalam ormas dan orpol. Instruksi Presiden ini dimuat dalam Berita Yudha terbitan 15 Maret 1966. Subandrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri lalu dicopot.<sup>110</sup> Subandrio diturunkan dari jabatannya, karena dianggap terlalu membela ambisi pribadi yang sejajar dengan kepentingan PKI.



---

<sup>109</sup> *Berita Yudha*, 8 Maret 1966, hal. 1

<sup>110</sup> *Berita Yudha*, 30 Maret 1966, hal. 1

**BAB 6**  
**ANALISA WACANA**  
**DI HARIAN ANGKATAN BERSENJATA DAN BERITA YUDHA**  
**1965-1966**

Bab ini menyajikan analisa data berupa artikel dari harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha dengan menggunakan teori Louis Althusser mengenai *Ideology State Apparatus*. Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini membagi analisa menjadi dua bagian, yakni analisa teks berdasarkan harian Angkatan Bersenjata dan analisa teks berdasarkan harian Berita Yudha. Selanjutnya, penelitian ini memuat analisa teks hasil gabungan dari kedua harian tersebut.

**6.1. Analisa Teks per Harian**

**6.1.1. Angkatan Bersenjata**

Gestapu harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Begitu salah satu tajuk dalam artikel yang dimuat di Harian Angkatan Bersenjata. Berita-berita yang dimuat di harian itu pasca G30S memang tak jauh dari peristiwa tersebut. PKI sebagai dalang pun kerap disebut. Harian Angkatan Bersenjata terbitan tanggal 3 November 1965 memuat tajuk yang berisikan ratusan orang di Garut nyaris dibunuh di Gestapu – istilah yang diberikan bagi G30S. Dari berita tersebut ada kesan bahwa peristiwa G30S sama kejinya dengan Gestapo, Nazi Jerman. Disini, seperti dikatakan Althusser, negara diwakili oleh TNI Angkatan Darat mencoba mengorganisir propaganda yang disebarluaskan dengan cara menempatkan perannya sebagai bagian dari rakyat.

Merujuk pada buku yang ditulis Althusser berjudul *Tentang Ideologi*, penyebaran ideologi dilakukan secara halus dan terus menerus. Tidak hanya itu. Harian Angkatan Bersenjata hampir setiap hari memuat berita tentang PKI dan ormas-ormasnya. Lekra sebagai sebuah lembaga kesenian juga tak luput dalam pemberitaan, baik langsung maupun tak langsung. Misalnya, pemberitaan yang dimuat tanggal 4 November 2009 bertajuk “Lobang Buaya dan Genjer”. Genjer-

genjer adalah lagu hasil karya Lekra yang memadukan lagu tradisional dengan kondisi saat itu. Meski isinya cukup sederhana, namun lagu ini dikaitkan dengan peristiwa G30S. Alasannya, lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh para oknum G30S/PKI saat mempersiapkan pergerakan. Lagu itu juga dinyanyikan para anggota Gerwani ketika mengeksekusi para jenderal TNI AD. Sejak saat itulah lagu tersebut sangat identik dengan peristiwa G30S dan mendapat stigma haram untuk dinyanyikan.

Lebih lanjut, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-12 yang berlangsung di Jakarta juga mengusung tema membersihkan tubuh PWI dari oknum atau unsur G30S. Berita mengenai kongres ini dimuat di harian Angkatan Bersenjata. PWI memutuskan mereka yang terlibat G30S dipecat, dan harian yang penerbitnya tersangkut G30S dihentikan. Artinya, Harian Rakjat sebagai harian milik PKI turut dihentikan penerbitannya. Padahal banyak anggota Lekra yang bekerja di surat kabar tersebut, seperti Martin Aleida dan Amarzan Loebis.

Kejadian di atas secara tidak langsung mengakibatkan Martin dan kawan-kawannya kehilangan mata pencaharian sebagai jurnalis dan sekaligus memberikan stigma kepada mereka sebagai antek PKI. Disinilah posisi Lekra sebagai obyek yang tersingkirkan nampak jelas. Ia tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri.

Merujuk pada gagasan Althusser yang menyatakan bahwa ideologi dalam wacana disebarkan secara halus sehingga kemudian dirasakan sebagai sebuah kebenaran. Pada kasus Lekra, pandangan bahwa Lekra adalah ormas di bawah PKI yang turut serta dalam G30S seakan membuat semua pernyataan yang ada merupakan sebuah kebenaran.

Tidak itu saja. Ungkapan itu diperkuat dengan artikel yang muncul di Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 9 November 1965 yang bertajuk “CS PKI dan Lekra Tebet Pusat Kegiatan Gestapu”. Artikel tersebut seolah-olah melegitimasi bahwa Lekra terlibat dalam G30S. Keterlibatan Lekra juga termasuk dalam penyediaan tempat dan persiapan gerakan tersebut. Kedekatan ideologi yang mereka miliki dengan PKI dan kerjasama di berbagai acara kebudayaan, cukup menuding bahwa Lekra merupakan antek PKI dan pelaku G30S.

Salah satu rumusan Althusser mengenai ideologi menjelaskan bahwa ideologi menginterpelasikan individu-individu sebagai subyek yang konkret. Artinya, ideologi merubah subyek-subyek yang berada di antara individu menjadi subyek-subyek yang aktif.<sup>111</sup> Dalam kasus Lekra, penempatan Lekra sebagai ormas dari PKI dalam pemberitaan menempatkan Lekra sendiri sebagai subyek yang dimaksud. Oleh sebab itu, ketika media menghembuskan berita mengenai PKI dan ormas-ormasnya atau bahkan cukup dengan menyebut kata “PKI” sudah membuat Lekra merasa turut disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Hal ini nampak dalam pernyataan Amarzan dalam film *Tjidurian 19*. Dia mengatakan, mereka harus kabur dengan melewati parit akibat demo yang terjadi di depan kantor Lekra. Selain Amarzan, Anantaguna seorang penulis Lekra mengaku bahwa dirinya harus diam-diam bersembunyi di dalam rumahnya tanpa bisa bekerja, sehingga pacarnya yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Maraknya pemberitaan di harian-harian yang menyudutkan Lekra, membuat dia khawatir orang-orang yang ditemuinya akan mengamuk dan bahkan membunuhnya karena tahu kalau dirinya anggota Lekra.

Kenyataan di atas berkaitan dengan penjelasan Althusser yang menyatakan bahwa telekomunikasi praktis panggil-memanggil, seperti yang dilakukan penguasa melalui media membuat orang yang disebut sadar bahwa dialah yang dimaksud.<sup>112</sup>

Selanjutnya, menurut Althusser, wacana berperan mendefinisikan dan menempatkan individu dalam posisi tertentu.<sup>113</sup> Dalam hal ini, penguasa membangun struktur diskursif bahwa Lekra adalah antek PKI yang terlibat dalam G30S. Sehingga Lekra sebagai antek PKI yang komunis dan anti tuhan sehingga patut dicurigai, diawasi terus-menerus, dan bahkan ditumpas.

Harian Angkatan Bersenjata tanggal 8 Januari 1966 pada halaman pertamanya memuat artikel yang bertajuk “Kita bersihkan gestapu/PKI, jangan lengah pada Nekolim”. Tajuk tersebut jelas-jelas menyatakan keberpihakan media. Keberpihakan tersebut selanjutnya diperkukuh dengan aksi-aksi sadis di lubang

<sup>111</sup> Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004, hal. 51

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> Eriyanto, *op.cit*, hal. 19

buaya untuk menunjukkan kepada masyarakat ketidakmanusiawian PKI dan antek-anteknya.

Dari pemberitaan-pemberitaan tersebut nampak bahwa media massa berusaha menanamkan rasa benci dan dendam. Potensi konflik masa lalu antara golongan agama dan komunis dimanfaatkan oleh militer sebagai pisau yang harus diasah supaya kian tajam. Pemberitaan jelas memperlihatkan adanya kepentingan kelas, sentimen agama, kebencian komunitas, dan perbedaan ideologi yang diggalang sebagai wacana anti komunis.

Respon masyarakat atas pemberitaan tersebut dapat dilihat dari pernyataan NU di Angkatan Bersenjata tanggal 6 Oktober 1965:

*“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) beserta delapan ormas-ormasnya tanggal 5 Oktober kemarin telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang antara lain memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja Umum/SOBSI, serta semua ormas-ormas lainnya yang ikut mendalangi dan/atau bekerja sama dengan apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”. Selain itu, dimohonkan pula kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar mencabut izin terbit untuk selama-lamanya semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah mendukung dan/atau membantu apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.*

Sara Mills, berdasarkan pada gagasan Althusser, menyatakan bahwa *pertama*, interpelasi berhubungan dengan pembentukan subyek ideologi; *kedua*, adanya kesadaran.<sup>114</sup> Artinya, Penguasa, khususnya militer, dalam hal ini mencoba menempatkan wacana-wacana tersebut di atas sebagai suatu hal yang alamiah tanpa penjelasan.

Seperti gagasan yang Althusser sampaikan bahwa penulis melalui teks yang dibuat menempatkan pembaca dalam subyek tertentu. Penempatan pembaca ini bisa dihubungkan dengan penyapaan seperti kata “kamu,” “anda,” dan “kita”. Penguasa sebagai penulis mencoba memasukkan masyarakat sebagai pembaca ke dalam pihak yang turut menjadi korban peristiwa G30S. Oleh sebab itu, seyogianya turut memerangi oknum-oknum G30S.

---

<sup>114</sup> Eriyanto, *op.cit*, hal. 200

### 6.1.2. Berita Yudha

Peristiwa G30S harus segera diselesaikan menjadi tema yang kerap terpampang di harian Berita Yudha dari sejak meletusnya G30S hingga sesudah Tap MPRS No. XXV ditetapkan pada tahun 1966.

Kekuasaan Orde Baru dimulai dengan proses stigmatisasi politik yang diberikan terhadap lawan-lawan politiknya. Berita Yudha sebagai salah satu dari agen ideologisasi negara menggaungkannya secara terus-menerus untuk membangun suatu konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan posisi lawan-lawan politik Orde Baru sebagai pihak yang 'jahat'.

Nama Lekra dalam pemberitaan memang tidak banyak disebut. Walau begitu, pemberitaan bahwa Lekra sebagai antek PKI, dan terlibat dalam G30S pernah disebutkan beberapa kali. Misalnya saja pada Berita Yudha pada tanggal 22 Oktober 1965 yang memuat berita pembersihan yang dilakukan oleh TNI berhasil menemukan dokumen-dokumen penting di gudang Lekra yang berada di jalan Cidurian, Jakarta Pusat. Masih di tanggal yang sama, tercantum berita mengenai PKI dan ormas-ormasnya yang terbukti terlibat dalam G30S. Selanjutnya, Harian Berita Yudha tanggal 5 Oktober 1965 memuat adanya temuan bahwa para korban disiksa secara terus-menerus di Lubang Buaya.

Pernyataan-pernyataan ini jelas menyudutkan Lekra, walau namanya tidak kerap disebut. Namun, berita yang menyatakan penemuan dokumen di gudang Lekra sudah jelas mengarahkan opini bahwa Lekra adalah antek PKI yang terlibat G30S. Disini media menempatkan posisi Lekra sebagai oknum jahat dan membahayakan masyarakat.

Dalam kasus Lekra, stigmatisasi terhadap Lekra bukanlah upaya pengeyahan Lekra sebagai sebuah kontingen, melainkan kualitas dari Lekra itu sendiri. Militer melihat Lekra yang memiliki kesamaan ideologis dengan PKI adalah lawan, dan dia akan menilai yurisprudensi yang menyebabkannya melakukan stigmatisasi hanya karena mereka yang terkuat sebagai sesuatu yang benar-benar politis. Ketakutannya ini nampak dari artikel yang dimuat di harian Berita Yudha, tanggal 6 Januari 1966 pada halaman pertama:

*“Panglima (Pangdam II/Pepelrada Sumut Brigjen P. Sobiran) mengingatkan bahwa andainya sekarang kita tidak dapat bersih menumpas*

*G30S, dikuatirkan akan timbul lagi pemberontakan PKI yang ketiga di masa-masa mendatang. Maka itu, demi keselamatan generasi bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali: Tumpas habis PKI/G30S sampai keakar-akarnya, hingga hantu-hantunya pun tak bisa nongol lagi!"*

Althusser mengatakan bahwa *ideological state apparatus* adalah organ yang secara tidak langsung mereproduksi kondisi-kondisi dalam masyarakat.<sup>115</sup> Kalimat tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat dibuat mengakui bahwa G30S/PKI beserta ormas-ormasnya adalah organ yang harus ditumpas. Bila tidak, maka ada ancaman bahwa peristiwa serupa G30S akan terulang kembali.

Ucapan Jenderal A.J. Mokoginta yang dimuat di Berita Yudha, tanggal 6 Januari 1966, halaman pertama memuat bahwa semua rakyat Indonesia meyakini dan menginsyafi Pancasila agar ideologi asing yang di Indonesia di-ageni oleh PKI tidak masuk kembali ke dalam masyarakat kita. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk membatalkan semua kompleksitas tindakan manusia, memberinya esensi-esensi yang sederhana, lalu kembali kepada hal yang nampak dan membangun sebuah dunia tanpa kotradiksi.<sup>116</sup> Dalam kalimat tersebut di atas, militer melalui Mokoginta ingin memasukkan esensi sederhana, yaitu Pancasila. Dengan begitu, rakyat memahfumi, menerima, dan mematuhinya.

Implikasi dari pemberitaan-pemberitaan tersebut semakin mengarahkan rasa benci dan dendam menjadi tuntutan pembubaran PKI dan antek-anteknya, termasuk Lekra. Tidak sampai di situ saja, tak sedikit seniman Lekra yang mengalami penghukuman bahkan tanpa proses hukum. Sisanya yang berhasil bebas harus memikul stigma sebagai antek komunis yang tidak bertuhan dan tidak manusiawi.

Harian Berita Yudha, tak ubahnya seperti harian Angkatan Bersenjata, kerap memuat pemberitaan mengenai G30S/PKI dan ormass-ormasnya. Kata "kita" adalah kata yang kerap diusung. Misalnya, "kita tumpas Gestapu," "kita waspada!.." dan seterusnya. Harian Berita Yudha menempatkan posisi dirinya sebagai penulis, dan rakyat sebagai pembaca adalah satu kesatuan.

---

<sup>115</sup> Eriyanto, *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 210

Misalnya saja dalam harian Berita Yudha pada tanggal 6 Januari 1966 yang memuat artikel mengenai penumpasan G30S/PKI sebagai siasat utama untuk mencapai kesentausaan bangsa. P. Sobiran yang menjabat sebagai Pangdam II/Pepelrada Sumatera Utara saat itu menyatakan bahwa G30S adalah pemberontakan PKI kedua. Dan, hal ini terjadi karena penumpasan aksi pemberontakan sebelumnya yang tidak bersih hingga ke akar. Sobiran menghimbau untuk melakukan pembersihan G30S/PKI hingga keakar-akarnya. Pada himbauan ini, Sobiran melibatkan pembaca sebagai pihak yang turut serta dalam upaya pembersihan itu. Dengan kata lain, wacana dalam pemberitaan menempatkan pembaca dalam posisi yang terlibat secara aktif.

## 6.2. Analisa Berita Media Tentang Lekra

Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan dari kedua media cetak tersebut dari Oktober 1965 hingga Maret 1966, pemerintah melalui apparatusnya militer mencoba melakukan penyebaran *hate crime* terhadap Lekra. Tajuk-tajuk dalam kedua media tersebut kerap mengenai anti-PKI beserta ormas-ormasnya. Misalnya saja kalimat: “Teror G30S menjalar ke bidang hasil-hasil seni dan budaya nasional kita.”

Dalam artikel tersebut, terlihat bahwa para seniman yang terlibat dalam G30S bukanlah loyal terhadap revolusi bangsa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa para seniman yang giat melakukan aktivitas kebudayaan bersama PKI juga turut bersalah dalam peristiwa G30S. Artikel-artikel tersebut mempertegas aksi penyebaran kebencian terhadap PKI dan mereka yang dianggap PKI.

Selain itu, nampak bahwa media massa tidak menempatkan dirinya sebagai media yang netral. Militer berupaya menciptakan kampanye wacana anti komunis.<sup>117</sup> Hal ini bisa terlihat dari: *Pertama*, penciptaan akronim “Gestapu” yang berasal dari singkatan Gerakan Tiga Puluh September. Hal ini untuk membangun daya imajinasi masyarakat dengan kekejaman dan kebiadaban Gestapo Nazi Jerman selama Perang Dunia II. *Kedua*, penciptaan kisah lubang buaya.

---

<sup>117</sup> Budiawan, *op.cit*, hal. 131.



Perang melawan kaum komunis kemudian seakan-akan menjadi perang suci, sehingga tak ayal lagi pembunuhan terhadap mereka yang diketahui (atau bahkan cuma diduga) komunis adalah perbuatan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Salah satu aksi mata pembantaian kaum komunis, Pipit Rochijat menyatakan bahwa ia melihat bagaimana mereka memohon-mohon ampun.<sup>118</sup> Mia Bustam<sup>119</sup>, seorang anggota Lekra menceritakan dalam bukunya yang bertajuk “Dari Kamp ke Kamp” bahwa tentara mendatangi kampung-kampung dengan truk untuk mengangkut orang-orang yang diduga terlibat dengan PKI atau ormas-ormasnya.

Tak sedikit seniman Lekra yang berkecimpung di dunia tulis menulis terkena imbasnya. Sebut saja, Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, Hersri Setiawan, Putu Oka Sukanta, dan Martin Aleida. Namun penyebaran rasa benci terhadap PKI yang melibatkan Lekra membuat para seniman Lekra sulit kembali kebidangnya. Hal ini bisa dilihat dari salah satu berita dalam harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 8 Februari 1966 di halaman pertamanya yang memuat bahwa Gestapu harus dihapuskan dari dalam kehidupan pers.

Martin Aleida dalam kesaksiannya menyatakan ia tidak mengalami teror fisik ketika bekerja sebagai wartawan pada majalah *Tempo*. Namun, ia kerap mendapat kunjungan dari orang-orang yang mewakili militer dikantornya. Selain itu, ia juga mendapat surat panggilan untuk melapor yang dikirimkan ke kantor. Tentu saja perlakuan ini membuat Martin, yang sebelumnya bekerja di surat kabar Harian Rakjat, merasa tidak nyaman, walau Gunawan Muhammad sebagai atasannya pada saat itu telah mengetahui kondisi Martin dan tetap mengizinkannya bekerja.

Hersri Setiawan, seniman Lekra yang mengalami pembuangan hingga ke Pulau Buru juga mengatakan bahwa ia harus menggunakan nama lain ketika menulis untuk media massa. Media cetak terkemuka di Indonesia pernah secara halus menolak tulisan Hersri, karena khawatir bila hariannya dibreidel oleh

---

<sup>118</sup> Pipit Rochijat dalam kesaksiannya menyatakan bahwa mereka yang sebetulnya hanya simpatisan BTI tidaklah tahu-menahu mengenai komunisme. Mereka hanya mendapatkan keuntungan dari aksi sepihak yang dilancarkan oleh BTI. Namun mereka terkena imbas aksi pembantaian. Lihat Budiawan, *op.cit*, hal. 137

<sup>119</sup> Mia Bustam, *Dari Kamp ke Kamp: Cerita Seorang Perempuan* ( Jakarta, 2008), hal. 50

pemerintah. Namun, menulis adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan, sehingga akhirnya ia terpaksa menggunakan nama lain.

Selain itu, ada juga Pramoedya Ananta Toer yang harus menelan siksaan ketika buku-bukunya dilarang terbit dan beredar. Beberapa bukunya yang sudah terlanjur didistribusikan bahkan dicari dan dikumpulkan untuk diberangus. Akhirnya, Pram mau tidak mau menerbitkan bukunya di luar negeri, Belanda, walau untuk itu ia dan teman-temannya tidak mendapatkan keuntungan.

Artikel-artikel yang dimuat dalam kedua harian tersebut pasca G30S menunjukkan bahwa PKI dan ormas-ormasnya adalah dalang dari peristiwa biadab G30S yang harus ditumpas dan diganyang. Selain itu, PKI dan ormas-ormasnya digembar-gemborkan sebagai anti Pancasila yang notabene anti Tuhan, sehingga membahayakan kehidupan beragama di Indonesia serta mengancam kesatuan bangsa.

Di sini terlihat upaya penguasa melalui media untuk merealisasikan sebuah ideologi yang bermuat anti PKI dan ormas-ormasnya. PKI dan ormas-ormasnya ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan. Dalam wacana hanya ada media, yaitu harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata sebagai penulis, dan masyarakat sebagai pembaca. Mengacu pada gagasan Althusser, maka dapat dikatakan bahwa wacana-wacana dalam pemberitaan kedua media tersebut pasca peristiwa G30S mencoba membangun ideologi hitam-putih yang merepresentasikan dirinya. Artinya, pihak penulis sebagai pihak yang benar dan PKI beserta ormas-ormasnya sebagai yang jahat.

Hingga kini stigma tersebut masih melekat. Seorang anggota DPRD dari fraksi PDI-P Yogyakarta dipermasalahkan, karena pernah terlibat PKI. Persyaratan “tidak terlibat G30S/PKI” pun masih diterapkan di dalam Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999.<sup>120</sup> Tap MPRS XXV Tahun 1966 menyatakan pelarangan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Lalu, tanggal 22 November 2002, DPR mengesahkan Undang-undang Partai Politik. Pada Bab IX pasal 16 ayat 5 tercantum: “Partai politik dilarang menganut,

---

<sup>120</sup> Asvi, *op.cit*, hal. 234

mengembangkan, dan menyebarkan ajaran, atau faham Komunisme/Marxisme-Leninisme.”<sup>121</sup>

Bagi Althusser, kekuatan ideologi lahir dari kesanggupannya untuk melibatkan kelas subordinat (rakyat) dalam praktek, lalu menuntun mereka pada identitas konstruk sosial atau subyektivitas tertentu yang melibatkan diri mereka dengan ideologi tersebut.<sup>122</sup> Walau hal ini bisa saja sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan sosial politis mereka sendiri. Dalam kasus ini, kedua media tersebut menuntun rakyat untuk bersikap sama dengan penguasa, yaitu anti PKI dan ormas-ormasnya. Rakyat dibuat jadi menyetujui pemikiran tersebut, walau rakyat tanpa disadari jadi mengorbankan haknya untuk berkumpul dan berpendapat.

Kini stigma masa lalu tersebut masih dipertahankan. Begitu takutnya pemerintah terhadap momok komunisme. Rasa takut itu bukanlah mencuat begitu saja. Ia adalah hasil reproduksi dari provokasi media massa terhadap Lekra di masa lalu yang terbawa hingga kini. Provokasi yang kemudian melahirkan Tritura: Bubarkan PKI; Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI; dan Turunkan harga-harga. Asvi Warman Adam dalam bukunya yang bertajuk “Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi pelaku dan Peristiwa” menyatakan Bila stigma itu masih muncul dalam perundang-undangan pada era reformasi, maka ketentuan ini tak lain dari produk mentalitas masa lalu yang dibentuk melalui penulisan sejarah yang dibengkokkan oleh rezim Orde Baru.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal 233

<sup>122</sup> Althusser, *op.cit*, hal. ix